

# **ANALISA**

**1978 — 12**

## **Pembinaan GENERASI MUDA**



**CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES**



## ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

### *Pemimpin Redaksi/*

*Penanggung jawab* : Kirdi DIPOYUDO

*Dewan Redaksi* : Daoed JOESOEF, Rufinus LAHUR,  
J. PANGLAYKIM, A.M.W. PRANARKA, M. Hadi SOESASTRO,  
Harry TJAN SILALAH dan Jusuf WANANDI

*Redaksi Pelaksana* : Kirdi DIPOYUDO, Rufinus LAHUR

STT : S.K. Menpen R.I. No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978, tgl. 28—8—1978

Harga per eks : Rp. 700,—

Harga langganan 1 tahun (12 nomor) : Rp. 8.000,— (bayar di muka), untuk Mahasiswa Rp. 7.200,— sudah termasuk ongkos kirim.

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat,  
Telepon 356532-5

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,  
Jakarta Pusat, Telepon 349489

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

PENGANTAR REDAKSI 916

*Kirdi DIPOYUDO,*

MANUSIA PANCASILA SASARAN PEMBINAAN GENERASI MUDA 919

*I. SUHARNO,*

MASALAH PEMBINAAN GENERASI MUDA DILIHAT DARI SEGI SOSIAL BUDAYA 932

*H. Roeslan ABDULGANI,*

PEMBINAAN GENERASI MUDA DI BIDANG SOSIAL POLITIK 961

*L. HARIANDJA,*

SUATU PANDANGAN TENTANG TEKNIK PEMBINAAN GENERASI MUDA 971

# PENGANTAR REDAKSI

1

*Pendidikan, pembinaan dan lain sebagainya pada dasarnya adalah kegiatan pokok dan jangka panjang, yang bermaksud memberikan bantuan kepada orang yang dididik atau dibina agar dapat berdiri atas kaki sendiri dalam proses pendewasaan yang terus berlanjut. Yang dididik atau dibina adalah semua orang, tua dan muda, sedangkan yang mendidik atau membina bisa orang lain dan lingkungan, tetapi juga bisa diri sendiri. Dalam hal yang terakhir ini yang bersangkutan adalah subyek dan obyek atau sasaran sekaligus. Akan tetapi dalam segala pendidikan atau pembinaan orang yang dibina atau dididik tidak boleh pasif belaka melainkan harus aktif juga. Bahkan dapat dikatakan bahwa makin aktif dia dalam pendidikan itu makin terjamin pula hasilnya. Memang yang ideal ialah adanya tingkat tinggi otoaktivitas pembinaan diri dalam masyarakat, termasuk generasi mudanya, di mana orang-orang membina dirinya sendiri menuju kedewasaan mereka dan mengembangkan tanggung jawab untuk menghadapi tantangan masa depan bangsa dan negara mereka.*

*Sehubungan dengan itu adalah penting bahwa pendidikan atau pembinaan dilakukan dalam rangka kehidupan perorangan maupun kemasyarakatan dan kenegaraan dengan landasan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu tujuan pokok pembinaan ialah*



*membentuk manusia-manusia Pancasila yang bertanggung jawab atas terciptanya masyarakat bangsa yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila seperti ditandaskan dalam GBHN 1978. Lagi pula hanya manusia-manusia Pancasila dapat mewujudkan masyarakat serupa itu.*

*Dengan kwalifikasi itu hendaknya semakin diintensifkan kegiatan pembinaan tersebut, baik yang dilakukan oleh orang lain dan lingkungan, termasuk generasi tua dan penguasa, maupun yang dilakukan oleh generasi muda yang bersangkutan. Seperti juga dianjurkan oleh Presiden Soeharto pada pembukaan Lokakarya Nasional Pembinaan Generasi Muda baru-baru ini, diharapkan agar "generasi muda ikut mengambil bagian untuk secara aktif memelopori usaha memasyarakatkan Pancasila di kalangan generasi muda itu sendiri". Bahkan ditegaskan bahwa "Sesungguhnya pengembangan generasi muda lebih banyak tergantung pada generasi muda itu sendiri. Oleh sebab itu bukan maksud kita untuk menjadikan generasi muda sebagai obyek pembinaan. Generasi muda adalah subyek dan bahkan merupakan unsur dinamika dalam pertumbuhan bangsa kita. Sejarah bangsa kita mencatat peran kepeloporan dari generasi muda dalam tiap babak sejarah bangsa kita".*

*Sehubungan dengan pembinaan generasi muda itu, ANALISA kali ini menurunkan beberapa tulisan yang menandakan bahwa dalam pembinaan itu Pancasila hendaknya dilihat sebagai landasan (sumber azasi), pedoman dan pegangan maupun tujuannya. Kirdi DIPOYUDO berusaha melukiskan manusia Pancasila sebagai sasaran pembinaan generasi muda. I. SUHARNO membahas masalah pembinaan generasi muda itu dari segi sosial budaya, sedangkan H. Roeslan ABDULGANI menyoroti pembinaan generasi muda di bidang sosial politik. Dalam karangan yang keempat dan terakhir L. HARIANDJA mengutarakan suatu pandangan tentang teknik pembinaan generasi muda yang melibatkan mereka secara aktif dalam kegiatan-kegiatannya.*

*Secara demikian pembinaan generasi muda, yang merupakan salah satu tugas nasional kita yang penting dan perlu*

*mendapat perhatian pokok kita, disoroti dari berbagai segi, baik segi ideologi, sosial budaya dan sosial politik maupun dari segi teknik pelaksanaannya. Oleh sebab itu keempat karangan itu saling melengkapi dan memberikan suatu gambaran yang cukup menyeluruh tentang pembinaan generasi muda.*

*Keseluruhan pandangan yang ditujukan pada generasi muda itu juga mengungkapkan suatu harapan agar orang-orang muda kita semakin memperhatikan masalah-masalah masyarakat bangsa mereka baik sekarang maupun di masa mendatang dan semakin ikut bertanggung jawab atas pemecahannya demi tercapainya tujuan-tujuan nasional kita. Dasar harapan itu terletak dalam sejarah pemuda kita yang menunjukkan kesanggupan mereka untuk memelopori perubahan dan bahkan menjadi juru bicara bangsa Indonesia.*

*Desember 1978*

*REDAKSI*

# MANUSIA PANCASILA SASARAN PEMBINAAN GENERASI MUDA

Kirdi DIPOYUDO

## PEMBINAAN GENERASI MUDA

Pembinaan generasi muda merupakan salah satu tugas nasional kita yang penting dan perlu mendapat perhatian pokok kita karena hari depan bangsa dan negara kita untuk sebagian besar bergantung padanya. Dalam persoalan ini kita bertolak pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh MPR dan peraturan-peraturan perundangan lain. Dalam GBHN 1978 antara lain ditetapkan bahwa "Pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan Bangsa dan pembangunan Nasional dengan memberikan bekal ketrampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian dan budi pekerti yang luhur."<sup>1</sup> Dengan demikian sebagai sasaran pembinaan generasi muda ditetapkan kader penerus perjuangan Bangsa dan pembangunan Nasional dan sasaran ini hendaknya dicapai dengan memberikan kepada generasi muda kita bekal ketrampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Pada hemat kami, tanpa mengabaikan segi-segi lain kita hendaknya meletakkan tekanan pada pemberian bekal budi pekerti yang

---

<sup>1</sup> Dikutip dari *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta : Pancuran Tujuh 1978), hal. 119



luhur. Kita harus juga memperhatikan ketentuan GBHN mengenai pendidikan karena pembinaan generasi muda harus dilakukan dalam rangka pendidikan nasional kita.

Mengenai pendidikan nasional itu ditetapkan dalam GBHN 1978 bahwa dia "berdasarkan atas Pancasila" dan oleh sebab itu "perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat" dan bahwa "Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan moral Pancasila" dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, dari Taman Kanak-kanak sampai Universitas, baik negeri maupun swasta.<sup>1</sup>

Ketentuan-ketentuan itu selanjutnya harus dikaitkan dengan ketetapan MPR tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Ketetapan ini antara lain menandakan : "Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan Masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah".<sup>2</sup> Dalam konsiderans dikatakan bahwa hal itu adalah perlu untuk menjaga kelestarian dan kemampuan Pancasila demi terwujudnya tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Tugas itu adalah sangat mendesak karena selama ini Pancasila belum dilaksanakan dengan baik seperti ditandaskan Presiden Soeharto pada peringatan hari ulang tahun ke-XXV Universitas Gajah Mada di Yogyakarta pada 19 Desember 1974:

---

1 *Ibid.* hal. 112

2 *Ibid.* hal. 57-58



”Pancasila adalah milik kita. Kita telah memilikinya, tetapi baru merasa memiliki, belum memahami atau menghayati apa yang sebenarnya Pancasila itu. Justru karena itulah, saya ingin mengajak — seperti yang beberapa kali saya nyatakan dalam berbagai kesempatan — untuk memikirkan bersama penghayatan dan penjabaran Pancasila agar dapat dimengerti, diamalkan dan memberi wujud yang nyata dalam segala segi kehidupan dan tingkah laku kita sehari-hari yang berdasarkan Pancasila.”<sup>1</sup>

Mengapa kita harus memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila diuraikan pada peringatan hari lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967: ”Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, Pancasila bukan dasar falsafah Negara yang sekedar dikeramatkan dalam dokumen Pembukaan UUD; melainkan Pancasila harus diamalkan. Tanpa diamalkan, apapun dasar falsafah yang kita pakai, apapun konsepsi yang kita buat, tidak akan berguna dan tidak ada artinya. Kita wajib mempertahankan Pancasila, kita wajib melaksanakan Pancasila, kita wajib mengisi kemerdekaan dengan mengamalkan Pancasila karena Pancasila adalah dasar dan tujuan kemerdekaan ini.”<sup>2</sup> Kita merebut kemerdekaan dan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankannya karena kita ingin mewujudkan cita-cita nasional kita, dan Pancasila mengandung jaminan-jaminan bahwa tujuan itu akan dicapai dengan baik asal benar-benar dilaksanakan, baik secara obyektif dalam peraturan-peraturan perundangan maupun secara subyektif dalam sikap dan tingkah laku warga negara masing-masing. Pancasila bersumber pada kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial dan merupakan pedoman yang tepat bagi manusia dan negaranya.

Dari semuanya itu disimpulkan bahwa demi tercapainya tujuan-tujuan nasional kita, baik Negara maupun para warganya

- 1 Dikutip dari *Pidato Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto pada Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-XXV Universitas Gajah Mada 19 Desember 1974 di Yogyakarta* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975)
- 2 *Pidato Pejabat Presiden Republik Indonesia Pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1967 di Jakarta* (Penerbitan Khusus 454, Departemen Penerangan RI)

harus melaksanakan segala kewajiban yang terkandung dalam Pancasila secara murni dan konsekwen sesuai dengan tekad Orde Baru. Dalam rangka itu pendidikan nasional kita, termasuk pembinaan generasi muda, mempunyai tugas pokok untuk membantu orang-orang menjadi manusia-manusia yang bukan saja memiliki kecerdasan, ketrampilan, daya kreasi dan kesegaran jasmani, melainkan juga memahami, menghayati dan melaksanakan moral Pancasila sebaik-baiknya dalam sikap dan tingkah laku mereka sehari-hari. Dengan tepat orang-orang serupa itu disebut manusia-manusia Pancasila. Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa sasaran pendidikan nasional kita, termasuk pembinaan generasi muda kita, ialah manusia-manusia Pancasila. Dalam tulisan ini kami berusaha melukiskan manusia Pancasila serupa itu, sebagai sumbangan pemikiran untuk men-sukseskan pembinaan generasi muda kita.<sup>1</sup>

## MANUSIA PANCASILA

Manusia Pancasila yang merupakan sasaran pendidikan nasional umumnya dan pembinaan generasi muda khususnya itu dapat dibatasi sebagai orang yang dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari dijiwai dan dibimbing oleh kelima sila dari Pancasila. Oleh sebab sila masing-masing mewajibkan kita untuk melakukan atau menghindari tindakan-tindakan tertentu, manusia Pancasila secara lebih terperinci dapat dilukiskan sebagai orang yang sebagai kebiasaan melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti berikut.

---

<sup>1</sup> Dalam usaha ini kami bertolak pada penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945, Ketetapan MPR No. 11/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan pemikiran filosofis tentang sila-sila Pancasila. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen P dan K Prof. Dardji Darmodihardjo SH pernah melukiskan manusia Pancasila secara singkat pada Diskusi ke-V Kependidikan di Yogyakarta tanggal 10 Juli 1978 seperti diberitakan dalam *Antara*, 12 Juli 1978

### **Dalam Rangka KeTuhanan Yang Maha Esa**

1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengakui serta memuliakan-Nya sebagai Pencipta alam semesta dan tujuannya baik dalam hati dan dengan kata-kata (sembahyang atau manembah) maupun dalam tingkah laku susila sehari-hari sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing.
2. Menghormati kemerdekaan orang dan umat lain untuk memeluk agama atau kepercayaan masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya atau kepercayaan itu.
3. Menghormati agama atau kepercayaan lain dan pemeluk atau penganutnya karena "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, kata hati dan agama; dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mematuhi hukumnya, baik secara perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain dan di tempat umum maupun secara privat".<sup>1</sup>
4. Ikut memperjuangkan terciptanya suasana yang baik bagi kehidupan beragama atau berkepercayaan dan melawan hal-hal seperti pertunjukan-pertunjukan dan penerbitan yang merugikan hidup moral keagamaan orang banyak.
5. Ikut memperjuangkan terwujudnya hidup keagamaan yang dewasa, bebas dari fanatisme sempit, takhyul, magi hitam dan lain sebagainya.
6. Ikut memperjuangkan adanya toleransi positif antar umat beragama dan berkepercayaan.
7. Ikut memperjuangkan adanya kerukunan dan kerjasama antar umat beragama dan berkepercayaan.

---

1 Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi manusia PBB



8. Melaksanakan sila-sila lain dan menjalankan tugas sehari-hari sebagai bakti terhadap Tuhan.

### **Dalam Rangka Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab**

1. Mengakui dan memperlakukan setiap orang, tanpa membedakan bangsa, keturunan, warna kulit, kelamin, agama dan kedudukan, sebagai sesama manusia yang sebagai makhluk berakal budi mempunyai martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi. Secara demikian dia menjunjung tinggi martabat manusia dan menghormati hak-hak asasi sesama manusia atau bertindak adil terhadapnya.

2. Memperlakukan sesama manusia seperti diri sendiri atau mengambil sikap tenggang rasa (tepa selira). Dengan perkataan lain, dia tidak melakukan terhadap sesama manusia apa yang tidak diinginkannya untuk dirinya sendiri, tetapi sebaliknya memperlakukan sesama manusia seperti yang diinginkannya untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu dia tidak sewenang-wenang, menindas, dan memeras sesamanya, lagi pula tidak melanggar hak-hak sesamanya atau merugikannya secara tidak adil.

3. Dia juga menolak perbudakan, kolonialisme, rasialisme, politik apartheid, dan segala macam diskriminasi terhadap sesama, lagi pula ikut berjuang agar segala bentuk ketidakadilan itu diakhiri.

4. Dalam menuntut hak-haknya tidak main hakim sendiri, tetapi menempuh jalan hukum untuk menjamin keadilan.

5. Ikut memperjuangkan kepastian hukum termasuk tegaknya keadilan (the rule of law) baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Sehubungan dengan itu dia ikut memperjuangkan hormat terhadap martabat manusia dan hak-hak asasi manusia di negerinya dan di dunia.

6. Memperlakukan bangsa-bangsa lain sebagai sesama anggota umat manusia dan menghormati hak-hak mereka.



7. Mendukung gerakan-gerakan pembebasan nasional dan membantu perjuangan kemerdekaan mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing.
8. Ikut memperjuangkan terciptanya suatu tata sosial baru baik nasional maupun internasional di mana martabat dan hak-hak asasi setiap orang dihormati agar setiap orang dapat menikmati hak-hak asasinya secara aman, hidup layak sebagai manusia, menunaikan kewajiban-kewajiban asasinya dengan baik, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya sebaik mungkin.

### **Dalam Rangka Persatuan Indonesia**

1. Menjunjung tinggi dan mencintai Indonesia sebagai kesatuan politik, kesatuan sosial dan budaya, kesatuan ekonomi dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Semuanya itu juga disebut memiliki dan mengembangkan patriotisme Indonesia.
2. Memiliki kesadaran dan kebanggaan nasional Indonesia serta mengembangkannya.
3. Ikut membela kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan dan kesejahteraan Indonesia.
4. Ikut memajukan persatuan bangsa dan proses integrasi.
5. Memiliki dan mengembangkan solidaritas terhadap sesama warganegara.
6. Menjunjung tinggi dan ikut mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, termasuk pandangan hidup dan moral bangsa, dasar falsafah negara dan bahasa Indonesia.
7. Menghormati hak-hak daerah dan kelompok yang sah sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia mencerminkan susunan negara nasional yang bercorak bhinneka

tunggal ika, bersatu dalam berbagai suku bangsa dan kelompok serta daerah. Persatuan yang tidak mengakui perbedaan apapun adalah paksaan yang menindas kemerdekaan perorangan dan otonomi yang sah dari golongan-golongan dan kelompok-kelompok. Persatuan Indonesia menghormati otonomi daerah-daerah, hak-hak minoritas, adat istiadat yang beraneka ragam, kebudayaan-kebudayaan daerah dan otonomi agama-agama serta kepercayaan-kepercayaan.

8. Menolak segala bentuk diskriminasi dan penyakit-penyakit sosial seperti korupsi, pemerasan, pungutan liar, hidup mewah di tengah-tengah kemiskinan dan lain sebagainya yang dapat membahayakan persatuan dan solidaritas nasional.

9. Ikut melawan gerakan-gerakan yang mengancam keselamatan negara dan keutuhan wilayahnya seperti gerakan-gerakan subversi, separatisme dan sebagainya.

10. Memperlakukan semua bangsa dan negara sebagai sesama warga umat manusia dan memperjuangkan hubungan baik serta kerjasama dengan mereka atas dasar kemerdekaan, persamaan, manfaat bersama dan saling menghormati demi terwujudnya dunia baru yang lebih baik.

11. Menolak baik isolasionisme maupun kolonialisme, imperialisme, ekspansionisme wilayah dan kosmopolitisme yang tidak menghargai nilai-nilai nasional. Persatuan Indonesia menuntut kemerdekaan terhadap negara-negara lain, tetapi juga menghormati hak-hak mereka.

12. Ikut memperjuangkan terciptanya suatu tata dunia baru yang memungkinkan semua bangsa dan negara menikmati hak-hak nasional mereka dan bekerjasama satu sama lain demi kepentingan mereka bersama.

**Dalam Rangka Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat  
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

1. Menyadari diri sebagai warga negara yang ikut bertanggung jawab atas keselamatan negara dan pelaksanaan tugas-tugasnya "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."<sup>1</sup>
2. Menerima dan memperlakukan setiap orang Indonesia sebagai sesama warga negara dengan persamaan hak dan kewajiban.
3. Menghormati keyakinan dan pendapat sesama biarpun mungkin tidak menyetujuinya sesuai dengan ketentuan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyalurkan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan sarana apapun dan tidak peduli batas-batas (negara)."<sup>2</sup>
4. Ikut dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung, bersama-sama dengan sesama warga negara atas dasar persamaan hak dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan umum.
5. Ikut dalam pemilihan-pemilihan umum guna memilih wakil-wakil rakyat untuk MPR, DPR dan DPRD.
6. Lewat MPR ikut menentukan Garis-garis Besar Haluan Negara, dan lewat DPR ikut mengawasi pelaksanaannya, menetapkan anggaran pendapatan dan pengeluaran negara, dan

---

1 Pembukaan UUD 1945

2 Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB



## ANALISA

mengawasi Pemerintah agar semuanya itu dilaksanakan dengan baik.

7. Ikut memperjuangkan agar "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya" yang dijamin oleh UUD 1945 benar-benar dihormati dan dilaksanakan secara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum.<sup>1</sup>

8. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dan menerima serta melaksanakan keputusan hasilnya.

9. Mematuhi Hukum Nasional, termasuk UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR dan peraturan perundangan lain, sebagai keputusan bersama rakyat.

### **Dalam Rangka Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

1. Memperhatikan kesejahteraan umum yang menjadi urusan negara dan memberikan sumbangannya sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing demi terwujudnya kesejahteraan umum itu.

2. Mematuhi peraturan-peraturan perundangan yang ditetapkan oleh negara sebagai sarana utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum itu, khususnya membayar pajak secara jujur sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. Dalam menggunakan hak milik pribadi memperhatikan fungsi sosialnya.

4. Ikut memperjuangkan agar semua warga negara, terutama yang lemah kedudukannya, dapat ikut dalam perekonomian dan mendapatkan bagian yang wajar dari pendapatan nasional untuk

---

1 Pasal 28 UUD 1945



mewujudkan kesejahteraan pribadi dan keluarga masing-masing. Dalam rangka itu ikut memperjuangkan agar negara menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,<sup>1</sup> dan memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.<sup>2</sup>

5. Ikut memperjuangkan agar negara membagi beban dan manfaat, khususnya pendapatan nasional, kepada para warganya secara proporsional, sambil membantu mereka yang lemah guna menjaga adanya keadilan.

6. Ikut memperjuangkan agar tiap-tiap warga negara dapat menikmati haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang diakui pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945.

7. Ikut memperjuangkan agar tiap-tiap warga negara dapat menikmati haknya untuk "mendapat pengajaran", yang diakui pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945.

8. Memperjuangkan suatu sistem penggajian yang seimbang secara horisontal maupun antar sektor maupun secara vertikal untuk mencegah perbedaan-perbedaan yang menyolok.

9. Memperjuangkan suatu sistem harga barang-barang dan jasa-jasa yang seimbang untuk memungkinkan semua warga negara, khususnya yang lemah kedudukannya, hidup secara layak, dan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan serta kekuatan ekonomi pada suatu kelompok kecil dan perbedaan-perbedaan sosial yang menyolok.

10. Memperjuangkan diadakannya jaminan-jaminan sosial bagi segala lapisan masyarakat dengan memajukan asuransi-asuransi dan pelaksanaan undang-undang kesejahteraan sosial yang baik.

---

1 Lihat pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945

2 Pasal 34 UUD 1945

## ANALISA

11. Memperjuangkan agar konsumsi diatur sesuai dengan kemampuan ekonomi nasional sambil memperhatikan keadaan rakyat banyak, dan agar produksi bahan-bahan pokok diberi prioritas.

12. Pendek kata, demi terwujudnya keadilan sosial manusia Pancasila ikut memperjuangkan pembangunan suatu tata masyarakat di mana semua lapisan masyarakat secara aktif ikut dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya nasional, dan secara demikian ikut menikmati kesejahteraan lahir batin.

## PENUTUP

Itulah secara singkat citra manusia Pancasila sejati. Terwujudnya orang-orang serupa itu adalah sangat penting untuk masyarakat dan negara, khususnya karena Pancasila dan penjabarannya dalam UUD 1945 maupun dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, asal dipahami, dihayati dan dilaksanakan dengan baik dalam segala segi kehidupan dalam tata pergaulan Bangsa Indonesia, merupakan jaminan bagi tercapainya tujuan-tujuan nasional, khususnya terwujudnya "suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila",<sup>1</sup> yang pada gilirannya akan memungkinkan setiap warga negara hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mencapai kesejahteraan lahir batinnya.

Sehubungan dengan itu negara wajib memberikan bimbingan dan menciptakan suasana di mana moral atau budi pekerti luhur yang terkandung dalam Pancasila dapat diamalkan dengan mudah. Sesuai dengan itu dalam Penjelasan Umum UUD 1945 ditegaskan bahwa "Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti

---

1 GBHN 1978, dikutip dari *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta : Pancuran Tujuh, 1978), hal. 79

kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.”<sup>1</sup>

Membangun masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan pada akhirnya berarti membangun manusia-manusia Pancasila karena seperti halnya dengan semua bangsa lain, bangsa Indonesia terdiri atas kelompok-kelompok masyarakat besar maupun kecil, setiap kelompok terdiri atas keluarga-keluarga, dan setiap keluarga terdiri atas pribadi-pribadi. Menanggapi pendapat bahwa masyarakat yang adil dan makmur harus dibangun lebih dahulu dan baru kemudian akan lahir manusia-manusia Pancasila, harus ditegaskan bahwa apabila pembangunan manusia-manusia Pancasila harus dilaksanakan setelah masyarakat yang adil dan makmur itu terwujud, maka manusia Pancasila tidak akan pernah lahir. Oleh sebab itu membangun manusia-manusia Pancasila tidak dapat ditunda. Hanya manusia Pancasila lah dapat mewujudkan masyarakat Pancasila. Selain itu pelaksanaan subyektif Pancasila itu akan mempermudah atau paling tidak memungkinkan pelaksanaan obyektifnya atau pelaksanaannya dalam kehidupan kenegaraan yang pada gilirannya berarti bahwa kepentingan-kepentingan negara dan kepentingan-kepentingan pribadi semua warga negara mendapatkan perhatian yang wajar dalam suatu keseimbangan yang tepat. Sebagai konsekwensinya akan terjamin kepastian hukum dan tersedia barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat banyak. Oleh sebab itu Pancasila bukan saja harus dipertahankan dan diamankan tetapi terutama juga dipahami dan dilaksanakan secara murni dan konsekwen. Dalam rangka itu adalah sangat mendesak untuk mengarahkan pembinaan generasi muda kita pada pembentukan manusia-manusia Pancasila.

---

1 Dikutip dari *Kitab Himpunan Hasil Karya M.P.R.S.* (Jakarta : Erlangga, 1970), hal. 26



# MASALAH PEMBINAAN GENERASI MUDA DILIHAT DARI SEGI SOSIAL BUDAYA\*

I. SUHARNO

## PENDAHULUAN

*Karmany evā dhikāras te  
mā phaleshu kadāchana  
mā karma phala hetur bhur  
mā te sango 'stv akarmani*

*''Kewajibanmu kini hanya bertindak  
bekerja tiada mengharapakan hasil  
jangan sekali pahala jadi motifmu  
jangan pula hanya berdiam-diri jadi tujuanmu''*

*(Bhagavadgita)*

Pada waktu lima puluh tahun yang lalu beberapa pemimpin pemuda kita bersepakat menuliskan huruf-huruf permata pada lembaran emas sejarah Indonesia berupa Sumpah Pemuda, ajaran yang terdapat pada kutipan di atas mungkin sekali tidak menjadi landasan semangat mereka. Tetapi berdasarkan fakta yang dapat kita amati secara historis dan obyektif, jiwa tanpa pamrih serta dinamika yang terarah sebagaimana tersirat dalam

---

\* Prasaran pada *Lokakarya Nasional Pembinaan Generasi Muda*, Jakarta, 4-7 Oktober 1978. I. SUHARNO adalah dari Lembaga anthropologi Universitas Cenderawasih Jayapura



kutipan di atas jelas telah merupakan salah satu sumber utama semangat mereka yang secara berani dan konsekwen telah mereka hayati sepenuhnya. Terbinanya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang telah hidup sampai saat ini tidak dapat dilepaskan dari semangat idealisme tanpa pamrih dan dinamika bertujuan jelas, yaitu merdeka dan mengisi kemerdekaan, dan yang telah melahirkan sendi-sendi pokok Bangsa Indonesia, yaitu UUD 45, Pancasila, dan bangkit serta berkembangnya usaha membina harga diri dan identitas kepribadian nasional sebagai bangsa warga dunia yang terhormat, tertib, dan beradab. Idealisme yang diwarnai oleh kepentingan pribadi atau golongan tiada lain adalah egosentrisme atau kelompokisme yang sempit, sedangkan idealisme tanpa dinamika tidak lebih dari suatu impian. Dikotomi idealisme dan dinamika ini akan sering tersirat dalam prasaran ini.

Sosial budaya manusia adalah totalitas tingkah laku manusia baik secara individu maupun secara bermasyarakat dan dunia arti serta nilai-nilai kehidupannya yang dicerminkan oleh tingkah laku itu baik secara verbal (kebahasaan) maupun non-verbal, serta baik secara overt (nampak) maupun covert (tersirat/tak tampak) (lihat Linton, 1936, dan Pike, 1956). Apabila terdapat suatu equilibrium (kemantapan) dan keserasian (harmony) antara tingkah laku dan dunia arti/nilai-nilai hidup pada suatu masyarakat, maka kita dapat berkata bahwa masyarakat tersebut telah mencapai stabilitas dalam kehidupan sosial-budayanya.

Kemantapan dan keserasian hubungan antara dunia nilai dan tingkah laku manusia ini agar dapat hidup subur memerlukan dua syarat pokok, yaitu kesemestaan (universalisme) nilai-nilai dan tingkah laku yang mencerminkannya dalam dunia permukaan, dan keanekaragaman (differentialisme) sikap serta cara hidup sebagai ungkapan kebebasan individu yang secara khas masih diikat lagi oleh adat istiadat masyarakat di mana ia menjadi anggotanya. Dalam konteks Indonesia, apabila yang pertama itu dapat kita katakan nilai-nilai nasional yang stabil tetapi juga progresif dan reseptif terhadap perkembangan-

perkembangan baru tanpa mempengaruhi kaidah-kaidah pokoknya, maka yang kedua dapat kita katakan sebagai kaleidoscope Bhinneka Tunggal Ika yang selalu bergerak dinamis memberi aneka warna khas Indonesia pada nilai-nilai semestanya.

Realita semesta ini pada masyarakat menyangkut apa yang menurut T.H. Huxley dan Julian Huxley, 1947, dinamakan sistem ethos. Sistem ethos ini, baik yang intuitif (individual), naturalistis (moralitas warisan dan biologis), maupun evolusioner (dinamis karena kemajuan ilmu pengetahuan dan alam pikir manusia) tidak lain merupakan kendali kehidupan masyarakat. Kita sepatutnya merasa bersyukur bahwa sumber trilogi ethos nasional telah kita miliki dan terpateri sejak Bangsa Indonesia merdeka dalam UUD 45 dan Pancasila.

Kalau kita lihat dari jaman kini, idealisme para pemimpin pemuda 50 tahun yang lalu sudah merupakan untaian nilai-nilai kehidupan nasional, yang secara mantap dan serasi dicerminkan oleh dinamika tingkah lakunya, yaitu yang secara verbal berupa kalimat-kalimat Sumpah Pemuda itu sendiri dan secara non-verbal dicerminkan oleh tindakan serta perjuangan bangsa Indonesia yang terus menerus dilakukan sampai saat ini. Secara overt baik tingkah laku verbal maupun non-verbal sebagai konsekuensi Sumpah Pemuda itu telah menjadi kenyataan sejarah. Sedangkan secara covert tingkah laku bangsa Indonesia telah selalu terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya yang sebagaimana halnya dengan lunas kapal berfungsi sebagai ballast (pemantap) atau stabilisator arah kehidupan sosial budaya Indonesia, yang sering mengalami tubrukan dengan arus nilai-nilai lain. Arus semacam ini bisa berasal dari dalam berupa kekuatan nilai-nilai destruktif ekstrim kiri (perpecahan, sukuisme, pemberontakan DI—TII, Pemberontakan PKI Madiun, G30S/PKI, liberalisme, gerakan campus-is-a-sacred ground, dan sebagainya) dan juga yang berupa kekuatan nilai ekstrim kanan (sikap yesmen, Bapak can do no wrong, Barisan Pendukung Soekarno, dan sebagainya). Di samping itu tidak bisa diabaikan adanya arus pengaruh sosial budaya dari luar. Arus dari luar ini tidak bisa dihindari kederasan persentuhannya dengan nilai-nilai sosial

budaya Indonesia karena majunya teknologi dan sistem komunikasi, ilmu pengetahuan (antara lain baru-baru ini dengan ditemukannya cara untuk mempengaruhi DNA, bayi tabung percobaan, perkandungan dengan inseminasi, operasi plastik dan pengubahan kelamin), dan meningkatnya mobilitas manusia. Untunglah baik secara negatif, yaitu a priori hati-hati atau bahkan curiga, maupun secara positif, yaitu rasionil dan analitis, nilai-nilai sosial budaya Indonesia bagaikan jangkar idealisme nasional telah selalu menyaring pengaruh-pengaruh yang merugikan dan dengan demikian telah menyelamatkan bangsa kita. Dalam penyelamatan ini tidak dapat diabaikan peranan generasi tua, baik ia ABRI maupun sipil, yang dengan bantuan serta dinamika generasi muda, telah menjadi pelaku dan pengarah pertahanan dan penyelamatan nilai-nilai sosial budaya nasional. Sesungguhnya, fungsi generasi muda sebagai peserta dan penghayat dinamika serta fungsi generasi tua sebagai jangkar dan kemudi memegang nilai-nilai idealisme itu selalu sejajar dan kait mengait. Tetapi kita tidak dapat menutup mata kepada kenyataan-kenyataan, yang baik dengan sengaja atau tidak telah timbul dalam kehidupan masyarakat kita bahwa *jurang perbedaan*, dan bukannya *keserasian hubungan* antara generasi tua dan generasi muda sering lebih dibesar-besarkan.

Idealisme sosial budaya bangsa Indonesia sebagai isi dunia arti serta nilai-nilai kehidupannya secara jelas telah dituangkan dalam GBHN sebagai isi Tap MPR No. IV/1978 khususnya Bab III B No. 15 b paragraf kedua, yang berbunyi : "Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan Pribadi Manusia Indonesia harus benar-benar menunjukkan nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijiwai Pancasila. Sedangkan kebudayaan itu sendiri harus merupakan penghayatan nilai-nilai yang luhur sehingga tidak dipisahkan dari Manusia Budaya Indonesia sebagai pendukungnya." Demikian pula dalam Bab IV di bawah judul : AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL BUDAYA beberapa paragraf pada nomor : 3. Kebudayaan disebutkan antara lain : "a. Nilai budaya Indonesia terus dibina dan dikembangkan guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkuat jiwa kesatuan



nasional. b. Kebudayaan nasional terus dibina atas dasar norma-norma Pancasila dan diarahkan pada penerapan nilai-nilai yang tetap mencerminkan kepribadian bangsa dan meningkatkan nilai-nilai yang luhur. Dalam pada itu perlu ditiadakan dan dicegah nilai-nilai sosial budaya yang bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit. c. Dengan tumbuhnya kebudayaan nasional yang berkepribadian dan berkesadaran maka sekaligus dapat ditanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif, sedang di lain pihak ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan, d. Disiplin nasional dibina dan dikembangkan secara lebih nyata, dalam usaha untuk memperkokoh kesetiakawanan nasional, lebih menanamkan sikap mental tenggang rasa, hemat dan prasaja, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian, jujur dan kewiraan”.

Idealisme yang indah itu tidak akan ada artinya apabila ia tidak diwujudkan berupa tingkah laku yang serasi dan sesuai, dan pelaku tingkah laku ini sebenarnya juga sudah didefinisi dalam Tap MPR yang sama di bawah judul seperti di atas, yaitu no. 10 Generasi Muda dan no. 11 Peranan Wanita dalam Pembangunan dan Pembinaan Bangsa.

Oleh karena itu prasaran ini tidak akan melepaskan dirinya dari gagasan-gagasan pokok sosial budaya Indonesia sebagai landasan yang tidak dapat ditawar-tawar, dan juga dari dinamika terarah sebagai ciri, mutu, dan mekanisme pelaksanaan gagasan-gagasan tersebut.

## NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA INDONESIA

### Masalah Identitas

Dalam dunia pengalaman manusia, akibat pengamatan dan keumuman (generalisasi) karena gejala-gejala atau pola-pola mirip dan bahkan kadang-kadang identik yang muncul berulang-



ulang, secara hampir harafiah dapat dikatakan telah sering timbul penilaian-penilaian stereotipis. Stereotipe ini kadang-kadang lucu tetapi kadang-kadang cukup serius untuk dipertimbangkan. Pada tahun 1933, dua orang sarjana Barat, yaitu Katz dan Braly, mulai merintis penelitian tentang stereotipe mahasiswa di Amerika Serikat berdasarkan latar-belakang etnisnya. Secara awam seringkali kita mendengar kesan orang Barat tentang orang Indonesia, yaitu antara lain bahwa orang Indonesia selalu tersenyum, dan bahwa amat sulit untuk mengetahui apakah senyuman orang Indonesia itu merupakan tingkah laku overt non-verbal yang mencerminkan dunia arti yang positif atau negatif.

Anecdote kecil semacam itu sebenarnya dapat mempunyai implikasi yang cukup luas, yaitu berupa pertanyaan, antara lain, "Apakah dan bagaimanakah identitas sosial budaya Indonesia itu?" Di samping itu bisa timbul pertanyaan di mana batas-batas daerah pengertian sosial dan daerah pengertian budaya. Beberapa ahli menyayangkan adanya kekurang-pekaan terhadap perbedaan sosial dan budaya Indonesia. Menurut Bachtiar 1978: "..... perbedaan antara sistim budaya dan sistim sosial (di Indonesia) kurang diperhatikan ....." (dalam kurung persegi tambahan saya I.S.). Menurut pendapat saya, meskipun sistem budaya dan sistem sosial Indonesia dapat dilihat sebagai dua hal yang dapat dibedakan, tetapi bagaikan dua muka sehelai kertas atau dewa Yunani Kuno Janus, kedua sistem itu integral dalam kehidupan Indonesia dan tidak dapat dipisah-pisahkan tanpa mengurangi arti keseluruhan sosial budaya Indonesia sebagai identitas nasional. Secara logis pendapat itu saya akui masih berupa *petitio principii*, yaitu mempertanyakan pertanyaan semula, yaitu : apakah identitas sosial budaya Indonesia itu, tanpa memberi jawaban yang kena.

Memberi definisi identitas sosial budaya Indonesia sama sulitnya seperti usaha memecah batu permata kasar untuk digosok menjadi intan dengan bentuk yang diinginkan serba sempurna. Sejak van Eerde 1920 sampai Mochtar Lubis 1977 usaha memberi definisi manusia Indonesia sebagai pelaku sosial budayanya telah merupakan usaha yang meskipun patut dihargai

tetapi belum berhasil memberikan jawaban yang terperinci dan jelas tentang apa yang dimaksud. Bahkan usaha-usaha semacam itu biasanya mengundang timbulnya pertikaian pendapat. Pertikaian pendapat ini tidak dapat dihindarkan, oleh karena kalau definisi-definisi tersebut hanya didasarkan atas penelitian atau pengamatan terhadap tingkah laku sebagai *das Sein* tanpa asumsi dasar nilai-nilai sosial budaya Indonesia yang disetujui bersama sebagai *das Sollen*, tercapainya definisi tentang sosial budaya Indonesia tersebut akan berhenti pada suatu identitas kulit atau semu, serta berakhir pada kejenuhan yang mandek (stereotipis) dan tak berguna. Pada hal, satu-satunya asumsi dasar yang patut dan secara resmi dapat kita pakai justru mencerminkan tidak mungkinnya kita berhenti pada stereotipe dangkal tentang manusia Indonesia dan sosial budayanya.<sup>1</sup> Asumsi dasar ini tidak lain adalah UUD 45 dan Pancasila yang dicerminkan oleh kebhinneka-tunggal-ikaan bangsa Indonesia dalam berbagai tingkah lakunya. Dengan kata lain, apabila kita menerima asumsi dasar ini sebagai pegangan yang benar, maka salah satu jalan yang paling baik untuk membentuk identitas sosial budaya Indonesia ialah membina penyerasian hubungan tingkah laku manusia Indonesia (baik verbal, non-verbal, overt, maupun covert) *sesuai* dengan dunia arti, cita-cita, dan nilai-nilai kehidupan nasional sebagaimana tertera pada UUD 45, Pancasila, dan pedoman umum penjabarannya sebagaimana tertera dalam GBHN. Ini jelas menyangkut pembinaan manusia Indonesia, tidak saja khususnya generasi muda, tetapi juga generasi tua yang harus memberi suri teladan dan bimbingan yang tepat untuk usaha penyerasian hubungan tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai nasional ini. Ini bukan masalah gampang. Oleh karena ia menyangkut terbentuknya persetujuan secara luas pada seluruh bangsa Indonesia. Dari lahirnya Tap-tap MPR kita bisa memetik pelajaran, bahwa penyesuaian tingkah laku dengan nilai-nilai nasional masih terus memerlukan pertukaran pendapat, perdebatan, pembinaan, pengamanan kebijaksanaan, toleransi dan komunikasi yang efektif.

Oleh karena dalam jaman moderen ini Indonesia tidak dapat mengisolir dirinya dari pengaruh-pengaruh yang berkembang dari dalam dan yang datang dari luar, masalah identitas

sosial budaya Indonesia ini akan merupakan spektrum khas yang bergerak dinamis. Kalau dinamika ini berhenti, sosial budaya Indonesia akan membeku menjadi sosial budaya negara Utopia yang tidak pernah ada. Kiranya hal ini tidak akan terjadi. Tetapi kewaspadaan akan timbulnya kekacauan identitas juga tidak boleh diabaikan. Jadi, identitas sosial budaya Indonesia adalah identitas yang mencerminkan nilai-nilai nasional sebagaimana yang tertuang dalam UUD 45, Pancasila, dan GBHN dan terungkap oleh tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai itu. Tentu saja identitas ini merupakan kesatuan distinktif berbeda dengan identitas sosial budaya bangsa lain. Perbedaan ini bukan saja karena sebagai kesatuan ia *sui generis*, yaitu dari sendirinya berlainan dari yang lain, tetapi lebih-lebih karena bagaikan intan ia terdiri dari berbagai faset sosial budaya yang masing-masing merupakan himpunan sub-faset lagi yang dengan demikian memberi warna khusus kepada identitas ini. Ini seyogyanya jangan sampai hanya dipahami dan disadari oleh para cendekiawan saja, tetapi harus disebar-luaskan ke kesadaran seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan demikian sumber-sumber stereotipe yang mungkin berasal dari dalam karena ketidaktahuan (ignorance) dapat ditiadakan sedini mungkin. Ketidaktahuan tidak selamanya menjadi monopoli masyarakat yang terbelakang. Sebagai contoh, misalnya, sering terdengar anggapan bahwa sosial budaya masyarakat Irian Jaya adalah itu-itulah saja, yaitu terbelakang, "primitif", liar tak teratur, dan sama di mana-mana. Padahal kalau kita amati dengan teliti (lihat misalnya Gerbrands, 1967a, dan Gerbrands 1967b), dalam salah satu kelompok masyarakat saja terdapat variasi-variasi dari yang sangat halus (subtle) sampai yang sangat menyolok. Ini baru mengenai ukiran kayu. Contoh generalisasi yang dilakukan oleh van Eerde dan Mochtar Lubis menunjukkan betapa para ahli pun sering tidak mengetahui dengan persis adanya variasi-variasi yang terdapat dalam masyarakat dan yang tidak memungkinkannya membuat generalisasi terlalu luas. Demikianlah tentang masyarakat Jawa, yang sering kali dikatakan sebagai seragam di mana-mana, terbukti akan menunjukkan variasi-variasi yang cukup distinktif. Ambil saja misalnya, dari segi verbal, kata untuk "bola lampu listrik" dan misalnya juga, dari segi non-verbal, adat perkawinan. Dari ujung



barat pulau Jawa sampai ke Banyuwangi akan dibuktikan, bahwa variasi-variasi ada pada dua contoh kecil ini. Sebagai kesimpulan, identitas sosial budaya Indonesia akan tetap mantap apabila ia didasarkan pada idealisme yang sama, yaitu nilai-nilai nasional yang disebutkan di atas, dan dinyatakan dalam kebhineka-tunggal-ikaan pengungkapan dan variasi nilai-nilainya.

### **Pengembangan Nilai Sosial Budaya**

Dalam tiap masyarakat, pengembangan nilai-nilai sosial budaya selalu menyangkut proses kompleks penyampaian, penerusan, atau pewarisan nilai-nilai tersebut baik secara eksplisit maupun implisit, baik secara moderen maupun kuno/tradisionil, yang terjadi antara generasi tua dan generasi muda. Batas definitif antara generasi tua dan generasi muda meskipun tidak selalu jelas tetapi pada umumnya dapat dianalisa eksistensinya. Di beberapa kalangan tertentu, pengertian generasi muda itu sering dibatasi, demi suatu relevansi tertentu, secara umum, tetapi sekaligus juga secara sempit. Misalnya : "Pada umumnya golongan muda yaitu mereka yang berumur di bawah 30 tahun memegang peranan penting hanya pada saat-saat tertentu." (Onghokham 1977:15). Batasan yang dibuat dengan hati-hati ini tidak cukup jelas melihat pentingnya fungsi dan proses kompleks penerusan dan pewarisan nilai-nilai sosial budaya yang menyangkut baik generasi tua maupun generasi muda. Dengan membenarkan pendapat Hegel tentang *progress* yang terdiri dari Thesis, Synthesis, dan Antithesis, Whitehead 1960:27—40, melihat bahwa dalam pendidikan anak sejak kecil terdapat tahap-tahap perkembangan jiwa anak mulai dengan tahap romantika, tahap presisi, dan tahap generalisasi, yang batas-batasnya secara keumuran sengaja ia tolak untuk menentukannya. Dengan mengingat proses transfer nilai-nilai sosial budaya manusia penahapan perkembangan jiwa anak ini nampaknya lebih sesuai untuk memberi definisi generasi muda dari bawah ke atas, yaitu sejak ia lahir sampai ia secara bertanggungjawab dapat mempergunakan ketrampilan, kepercayaan akan dirinya sendiri, kematangan serta kewibawaannya untuk membimbing dan mengarahkan generasi yang lebih muda.



Demikianlah sebaliknya, dalam pengertian ini generasi tua adalah kelompok manusia yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Dengan kata lain pula, suatu aspek penting dari kebudayaan yang bernama pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses hubungan timbal balik antara generasi tua dan generasi muda yang berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai sosial budaya manusia. Jadi, secara umum pula dapat dikatakan bahwa fungsi pendidikan mulai jelas dan mempunyai nilai yang menentukan sejak seorang bayi lahir di dunia.

Apabila kita perhatikan konsepsi dasar mengenai nilai-nilai sosial budaya yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya sebagaimana tertera secara umum dalam UUD 45, Pancasila, dan GBHN, dan di lain pihak kita juga memperhatikan realita multifaset yang terdapat dalam masyarakat di seluruh Indonesia, maka pernyataan secara umum mengenai fungsi pendidikan sebagai sarana pengembangan nilai-nilai sosial budaya Indonesia yang disebut di atas perlu dilengkapi dengan konsepsi operasional yang bermanfaat dan memudahkan proses kompleks pengembangan dan penerusan serta pewarisan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Konsepsi operasional ini perlu, oleh karena tingkat kehidupan dan ragam kemajuan masyarakat di Indonesia berbeda-beda. Di Irian Jaya, misalnya, terdapat suatu kenyataan yang khas. Kekhasan daerah Irian Jaya ialah adalah generasi muda yang dinamis dan peka terhadap perubahan dan generasi tua yang statis dan kurang peka terhadap perubahan. Meskipun demikian, secara materialistis baik generasi tua maupun generasi muda mempunyai kemiripan-kemiripan, yaitu antara lain, berupa antusiasme untuk menikmati benda dan hasil teknologi modern (*finished products*) berupa berbagai barang yang dengan cepat dapat didatangkan dengan pesawat udara. Demikian pula terhadap fasilitas dari pemerintah maupun pihak misionaris, baik generasi tua maupun generasi muda mempunyai minat materialistis yang serupa. Oleh karena itu konsepsi operasional yang diterapkan di Irian Jaya untuk merubah sikap melalui pendidikan, misalnya, yang diarahkan kepada generasi tua akan kecil artinya, kalau malah tidak dapat dikatakan sia-sia belaka, sebab generasi tua ini hampir secara keseluruhan ingin mempertahankan nilai-nilai lama,

banyak di antaranya bertentangan dengan nilai-nilai nasional. Oleh karena itu, dalam kerangka pemikiran jangka panjang, masa depan di Irian Jaya hampir seutuhnya dapat diletakkan pada pundak generasi muda, dan oleh karenanya, pendidikan, baik formil maupun non-formil, sebaiknya dititikberatkan pada generasi mudanya. Dengan demikian pendidikan semacam ini secara konseptual dan operasional menuntut sifat-sifat yang berbeda dengan yang dilakukan di daerah lain, khususnya apabila di daerah atau bahkan lapisan masyarakat lain itu mencakup generasi tua yang lebih maju pikirannya.

Namun bagaimanapun juga, proses pendidikan sebagai usaha pengembangan nilai-nilai sosial budaya, baik di Irian Jaya, Kalimantan, maupun di Jakarta, menuntut tidak saja relevansi yang sesuai agar generasi muda dapat menghadapi masa depan dengan sebaik-baiknya, tetapi juga prasyarat agar generasi muda tidak kehilangan identitas atau kebanggaan serta harga dirinya karena kehilangan akar, yaitu hubungan dengan warisan kebudayaan dan nilai-nilai sosial leluhurnya.

Apabila pusat pandangan tentang warisan sosial-budaya ini semata-mata hanya terbatas pada nilai-nilai daerah, maka ia akan sempit dan merugikan. Sebaliknya, apabila ia mutlak terikat oleh hirarki vertikal yang dikomandokan dari atas ke bawah dengan slogan semu : demi kepentingan nasional, maka ia dapat menimbulkan kritik bahkan konflik sosial budaya. Sekali lagi, apabila pengembangan nilai-nilai sosial-budaya melalui pembinaan generasi muda tidak dilakukan dengan dan oleh orang-orang yang hati-hati dan moderat, kemungkinan timbulnya akibat yang tidak diharapkan, yaitu sikap bahkan gerakan ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, tidak dapat kita abaikan.

### **Peranan Pemerintah dalam Pengembangan Nilai-nilai Sosial Budaya**

Pengembangan nilai-nilai sosial budaya nasional tidak dapat dilepaskan dari peranan orang-orang tua atau lembaga-lembaga

yang mempunyai pengaruh, wibawa, dan kekuasaan serta fasilitas untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengarahkan pelaksanaan pengembangan itu. Suka atau tidak suka, peranan "the ruling class" (Mosca 1939) berlaku di mana-mana. Menurut pandangan Gaetano Mosca yang berkembang pada abad yang lalu itu, makin sederhana tingkat organisasi masyarakat, peranan orang yang mempunyai dukungan kekuatan fisik makin tinggi dalam menentukan arah kebijaksanaan masyarakat tersebut. Apabila konsepsi "the ruling class" ini dikembangkan secara militant, maka kita menemui ekstrimitas-ekstrimitas. Yang paling menyolok ialah telah disalahgunakannya gagasan "the ruling class" ini untuk membentuk landasan gagasan bagi terciptanya fascisme Italia yang destruktif itu. Gaetano Mosca sebenarnya juga melihat kekuatan-kekuatan sosial yang dapat mengendalikan atau meluruskan arah "the ruling class" itu, sehingga tercapailah situasi yang baiklah kita sebut "the ruling class rules by the rules of the ruled." Hal ini hanya mungkin terjadi apabila "the ruling class" bersikap moderat tetapi kuat, receptive tetapi memegang prinsip-prinsip terarah, dan mempunyai rencana kerja yang mantap dan didukung oleh tersedianya daya ahli dan dana yang memadai, dan memencarkan perhatiannya secara adil proporsional.

Sebagaimana disebut di muka, secara fundamental masalah pengembangan nilai-nilai sosial budaya Indonesia melalui pembinaan generasi muda telah jelas tertuang dalam GBHN. Tetapi bagaimanapun fundamentalnya dan jelasnya masalah-masalah tersebut bagi pemerintah dan para cendekiawan, apabila tidak terdapat komunikasi yang memadai, bebas dan fleksibel antara Pemerintah dan masyarakat secara timbal balik, ganjalan-ganjalan bagaikan "centeng tidur" di dekat proyek perbaikan jembatan bisa timbul di mana-mana. Salah satu jalan terbaik yang dapat ditempuh untuk menghindari gejolak akibat ganjalan-ganjalan ini ialah memberi akomodasi sejauh mungkin kepada berbagai lembaga nonpemerintah maupun pemerintah yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi sepenuh dan sejauh mungkin tidak saja untuk mendiskusikan, melokakaryakan, serta melaksanakan perencanaan pengembangan nilai-nilai sosial



budaya melalui pembinaan generasi muda tersebut, tetapi juga untuk menghayati dan mengawasi pelaksanaannya sebagai pengarah dan sumber dinamika agar pembinaan ini tidak berjalan terantuk-antuk dan menurut berhembusnya angin pengaruh tertentu. Pihak Pemerintah Orde Baru, khususnya yang sekarang ini, sudah giat dan terus meningkatkan kegiatannya menempuh jalan ini. Tetapi nampaknya masih perlu dibina suatu *consensus omnium* yang jauh lebih luas lagi. Oleh karena itu saya sarankan dalam prasaran ini agar dalam sidang-sidang komisi nanti dapat dirumuskan jalan yang semaksimal mungkin mantap. Hal ini akan membantu peranan Pemerintah dalam mengembangkan nilai-nilai sosial budaya Indonesia serta membina generasi muda secara berhasil bukan saja karena usahanya didasarkan atas otoritas atau kewibawaan "the ruling class" secara vertikal, tetapi juga atas kolegialitas horisontal, yaitu di mana kewibawaan dan otoritas selalu dipahami dengan rasa penuh pengertian dan toleransi serta dilandasi oleh hubungan mesra. Dengan cara ini Pemerintah dan masyarakat dalam banyak hal merupakan sejawat untuk tujuan yang sama: yaitu meningkatkan relevansi tingkah laku atau dinamika pembangunan yang sesuai dengan landasan serta dunia arti yang diterima dan dipahami bersama.

## PEMBINAAN GENERASI MUDA INDONESIA

### Peranan Orang Tua dalam Keluarga

Entah terjadiannya benar atau tidak, Remy Sylado 1977 secara tajam ngilu menyatakan kekesalannya terhadap sikap dua orang ibu penyanyi-penyanyi pop yang bersikap lebih (saya kutip Remy Sylado) "ngepop" dari anaknya yang bagaimanapun pop, modern, dan Inggris nyanyinya, pakaiannya, serta tingkah lakunya tetap berlatar belakang sosial budaya Melayu Sidoarjo dan Semarang. Mungkin sekali contoh ini adalah contoh paling ekstrim, yang menunjukkan bahwa generasi tua ikut bertanggungjawab dalam meningkatkan kecepatan irama "modern" tingkah laku, dan juga nilai-nilai hidup, generasi muda. Tetapi contoh lain juga disebut oleh Sudjoko 1977 bahwa



dari segi tertentu pihak generasi tua bersikap antipatik dan pasif terhadap citarasa dan tingkah laku generasi muda, yang justru seharusnya bisa dihayati dan dinikmati oleh generasi tua. Bagaimanapun juga, kehadiran atau absensi perhatian serta dorongan orang tua ini tidak bisa melepaskan tanggungjawabnya dari peran yang dilakukannya dalam hidup bersama dengan generasi muda.

Dalam rumusan sistem pendidikan Taman Siswa, terdapat suatu model (teladan) pendidikan yang bisa digambarkan sebagai persilangan poros vertikal di mana otoritas generasi tua terasa kuat dan poros horisontal di mana kolegialitas antara generasi tua dan generasi muda lebih menonjol. Gambaran itu sebagai berikut :

1. Ing ngarsa	asung tuladha
2. Ing madya	amangun karsa
3. Tut wuri	handayani

Hubungan 1. *Ing ngarsa asung tuladha* (apabila di depan memberi teladan) dan 3. *Tut wuri handayani* (apabila berada di belakang tetap dapat mengemudikan generasi muda) merupakan hubungan di mana sifat aktif dan mengawasi serta menuntun cukup besar berada di tangan generasi tua, oleh karena itu untuk mudahnya hubungan tersebut dinamakan hubungan atau poros vertikal. Sebaliknya, 2. *Ing madya amangun karsa* (apabila berada bersama dengan generasi muda generasi tua berusaha membangkitkan kemauan atau semangat), merupakan perspektif horisontal, di mana hubungan antara orang tua dan anak ditandai oleh adanya semangat kolegialitas, meskipun di sini juga secara eksplisit orang tua disebut sebagai pembangkit kemauan.

Dalam lapisan masyarakat yang telah agak maju dan mempunyai tata serta kebiasaan hidup teratur dan disiplin, kedua perspektif itu, yaitu yang vertikal maupun yang horisontal, dapat dilaksanakan dengan hambatan yang relatif kecil. Tetapi pengaruh hidup moderen juga telah memainkan peranan dalam

mengadakan modifikasi sifat dan pelaksanaan kedua perspektif itu. Dengan makin mobilnya generasi tua dan generasi muda dalam lapisan masyarakat yang telah agak maju ini kontak-kontak untuk melaksanakan dua perspektif tersebut menjadi makin jarang. Orang tua makin lama berada di luar rumah, demikian pula halnya dengan anak-anaknya. Apalagi dengan meningkatnya mobilitas karena meningkatnya sistem komunikasi/transportasi serta kemampuan bergerak (dengan pemilikan mobil, motor, uang untuk naik bis, taxi, pesawat terbang, dan kapal), persentuhan nilai-nilai keluarga dengan nilai-nilai dari luar keluarga menjadi makin meningkat juga.

Di samping itu peranan orang tua sering kali menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan secara harafiah, oleh karena timbulnya nilai-nilai baru secara nasional. Dalam menghadapi program KB, di satu pihak orang tua bertanggung jawab mendidik anak-anaknya dengan cara yang tepat sejalan dengan nilai baru ini, dan di pihak lain ia harus waspada akan penyalahgunaan mekanisme dan arti dari landasan pokok program KB. Di kota-kota besar hal ini masih ditambah lagi dengan timbulnya gejala penyalahgunaan narkotika, penyebaran bahan-bahan pornografis atau terlarang, penyajian iklan di mana-mana yang merangsang imajinasi sex, beredarnya film-film "wajar" dan "realistis" yang ditandai oleh adanya adegan kamar tidur, dan sebagainya. Dalam keadaan-keadaan seperti ini peranan orang tua tidak saja menjadi lebih berat, tetapi juga lebih kompleks. Andaikata keadaan di seluruh Indonesia memang demikian, maka peranan orang tua yang paling maksimal dapat dilakukan ialah dimensi yang paling lemah dalam persilangan dua perspektif itu, yaitu "Tut wuri handayani", yang sekarang lambangnya telah tersebar di seluruh Indonesia.

Tetapi apabila prinsip ini merupakan satu-satunya pegangan dan terlepas dari kedua prinsip yang lain itu, maka sesungguhnya telah dapat kita katakan bahwa perubahan sikap generasi tua dalam pendidikan telah berubah secara fundamental, yaitu ia menjadi *permisif*. Hal ini tentunya bukan yang dikehendaki oleh kita semua. Oleh karena itu Pemerintah kiranya perlu meningkatkan kewibawaan orang tua dalam keluarganya dengan

menekankan perlunya ketiga-tiga prinsip itu secara proporsional, sesuai dengan kondisi dan taraf kehidupan masyarakat di mana keluarga itu berada.

Di samping itu semua, sistem reesuksi bagi orangtua perlu diperhatikan, oleh karena tanpa reedukasi ini jurang pemisah antara generasi tua dan generasi muda bisa makin menjadi lebar. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Eka Budianta, 1978, bahwa orang tua perlu merubah dirinya demi kepentingan masa depan anak-anaknya. Ia mengusulkan, antara lain, agar dilakukan "..... penataran dan pemanfaatan media komunikasi massa secara seefektif mungkin." Di beberapa negara yang sudah maju masalah ini dipecahkan dengan antara lain mempergunakan program yang disebut "Family Encounters", yang biasanya dilakukan di motel, di mana sesudah seluruh pasangan suami-isteri mendapat bahan-bahan baik berupa ceramah, diskusi, maupun bacaan mereka dapat saling berhadapan sendiri-sendiri di kamar masing-masing, melakukan intro dan retrospeksi terhadap fungsi mereka sebagai suami isteri dan orang tua. Dengan modifikasi seperlunya, meskipun masih dalam tahap yang sangat terbatas, hal seperti ini bisa dimulai terutama di daerah-daerah kota besar yang tidak saja menunjukkan gejala tabrakan pandangan antara generasi tua dan generasi muda secara relatif lebih besar, dari pada di kota-kota kecil, tetapi yang biasanya juga mempunyai fasilitas yang relatif lebih memadai untuk keperluan ini. Dalam program semacam ini, antara lain, yang perlu diperhatikan adalah peranan keserasian (harmoni) dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Ini sangat bermanfaat dan berpengaruh guna membina optimisme pada generasi muda. Kenakalan atau kejatuhan anak ke jurang hidup yang gelap akibat broken homes bukan lagi menjadi imajinasi pengarang novel atau ceritera pendek. Kita menemuinya dalam kehidupan nyata di mana-mana. Juga sikap terbuka orang tua akan memainkan peranan penting bagi anak-anaknya untuk mengembangkan sikap kritis, analitis, kreatif, dan dinamis.

Sebenarnya yang menjadi masalah dalam pembinaan orang tua atau generasi tua ialah program apa yang dapat dilakukan di



daerah-daerah pedesaan, yang jumlahnya jauh lebih besar daripada daerah kota. Ini sangat terasa di Irian Jaya, misalnya, di mana prinsip *tut wuri handayani* tidak akan besar manfaatnya. Di daerah-daerah semacam ini justru prinsip yang pertama, yaitu *ing ngarsa asung tuladha* secara intensif dan penuh dedikasi harus diutamakan. Peranan Pemerintah di daerah-daerah semacam ini jauh lebih berat daripada di tempat-tempat di mana masyarakatnya telah tinggi kesadarannya untuk membantu program pendidikan, penyuluhan, dan pembangunan pada umumnya. Apabila daerah-daerah semacam ini masih di luar jangkauan administrasi pemerintah, sebagaimana halnya yang terdapat di Irian Jaya, maka badan-badan nonpemerintah, apakah ia misi atau pengusaha sumber kekayaan alam, sepatutnya diberi beban dan tanggung jawab ikut membantu program pemerintah dalam bidang pendidikan.

Dengan cara yang khusus lain dengan cara yang dipakai di daerah yang sudah agak maju, program yang harafiah berupa *tuntunan* bagi masyarakat itu tetap harus dikaitkan dengan penanaman nilai-nilai sosial budaya nasional dan melestarikan nilai-nilai daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai nasional, serta secara praktis dan relevant segera dapat dilihat hasilnya, masyarakat yang masih sederhana itu dididik dalam ketrampilan praktis. Merubah masyarakat yang masih berkoteka untuk menjadi masyarakat berbusana tanpa merubah keadaan-keadaan yang lain (cara membuat rumah, memelihara babi, membuang kotoran, dan sebagainya) tidak akan pernah dapat dilakukan dalam jangka pendek. Sejarah telah membuktikan hal ini. Khususnya di daerah-daerah seperti di pedalaman Irian Jaya, pengubahan sikap melalui pembinaan generasi muda tidak akan berhasil apabila program pendidikan konvensional (melalui SD, SMP, dsb.) diprioritaskan tanpa memberi jalan keluar pada apa yang terjadi pada masa yang akan dihadapi anak-anak sesudah mereka lulus sekolah. Di daerah-daerah semacam ini pola sekolah nasional secara konvensional perlu dimodifikasi sehingga program yang diterapkan sungguh-sungguh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.



## Peranan Sekolah

Sebagai suatu negara kepulauan yang terletak di persilangan lalu lintas internasional, Indonesia menghadapi tuntutan untuk maju dan membentuk sikap baru secara cepat tanpa kehilangan identitasnya. Sejak jaman Orde Lama diganti oleh Orde Baru, perubahan keadaan dari serba melarat di mana-mana menjadi keadaan yang jauh lebih baik nampak nyata dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Tetapi ada manfaatnya apabila kita menanyakan kepada kita sendiri, apakah kemajuan di bidang materiil itu juga diimbangi oleh apa yang disebut oleh Toffler, 1972, sebagai "psychic gratification" (kepuasan mental) yang justru sekarang ini menjadi kebutuhan yang dikejar-kejar dan dicari di negara-negara yang sudah sangat maju. Beberapa kali kita mendengar bahwa kemajuan yang berdasarkan teknologi atau *cyberculture* pada akhirnya akan tertumbuk pada tembok penghalang yang riil dalam kehidupan manusia, yaitu *kebutuhan manusiawi*, yaitu kebutuhan manusia sebagai manusia berbudaya dan bukan sebagai sejenis individu atau nomor dalam masyarakat konsumen barang jadi. Tetapi toh kenyataan yang terdapat dalam proses modernisasi memang telah dan akan selalu menghasilkan keadaan-keadaan baru yang selalu berubah tetapi sama dalam hakekatnya: konsumsi barang jadi dan berkejaran dengan waktu untuk lebih banyak mendapatkan barang jadi untuk, sebagai dalih, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Fenomena ini tidak mungkin atau paling sedikit akan sulit diubah. Kita tidak akan hidup kembali di tengah hutan atau di tepi sawah ladang yang nyatanya makin habis itu. Yang bisa diubah adalah sikap kita, terutama generasi muda kita, untuk dapat menghadapi jaman konsumerisme dan, juga menurut Toffler, 1972, "the death of permanence" berakhirnya jaman serba tetap dan dapat diingat dengan mudah.

Peranan sekolah untuk mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi jaman seperti ini jelas sangat besar. Peranan sekolah tidak boleh ketinggalan kereta api dengan kemajuan yang terdapat di luar sekolah. Dan mulainya peranan sekolah sebenarnya harus pada tingkat yang paling bawah, yaitu Taman Kanak-kanak. Mulai pada tingkat inilah penanaman nilai-nilai

sosial budaya nasional harus dimulai, disamping juga ditanamkannya sikap baru untuk tetap berpijak pada nilai-nilai nasional menghadapi jaman modern yang pada waktu anak-anak kecil itu sudah menginjakkan kakinya di sekolah menengah mungkin sudah berubah dengan makin derasnya pemakaian barang jadi berbagai macam. Juga perlu diperhatikan, bahwa masa anak-anak dari lahir sampai umur 6 tahun merupakan masa berkembangnya otak yang sangat perlu untuk modal dan alat mengembangkan budayanya.

Kalau kita lihat ke masa yang sudah lalu, kita sering kali bisa bertanya, mengapa justru pendidikan tinggi, baik pemerintah maupun swasta, mendapat perhatian begitu besar, sedang justru landasan yang paling fundamental, yaitu pendidikan pra-Taman Kanak-kanak dan juga pendidikan di Taman Kanak-kanak, kurang mendapat perhatian. Di kalangan para pendidik sudah diketahui, bahwa sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, Plato (Jowett 1892) telah mengajukan gagasannya bahwa pemerintah harus mempunyai peranan yang menentukan dalam pendidikan anak segera sesudah anak itu dapat dilepaskan dari susuan ibunya. Gagasan ini dengan jelas juga telah tertuang pada GBHN, di mana kedudukan dan pentingnya Taman Kanak-kanak disebut dengan tegas. Ini merupakan kemajuan sikap nasional, yang masih memerlukan penjabaran serta pelaksanaannya secara realistis dan sesuai dengan kondisi serta situasi di daerah-daerah yang dapat menunjang atau untuk sementara menunggu realisasinya.

Yang ingin saya ulangi di sini ialah penanaman nilai-nilai sosial budaya sebagai pegangan batin pada generasi muda, yang secara seimbang harus disertai dengan penanaman keahlian dan ketrampilan untuk hidup di jaman modern dan makin menuju ke arah industrialisasi atau setidaknya motorisasi serta mekanisasi ini. Ketrampilan tanpa pegangan nilai-nilai sosial budaya secara batiniah akan menyebabkan individu-individu yang selalu ingin memperbaiki dirinya melalui pekerjaan yang lebih baik, dan penghasilan yang lebih baik, dan menjadi konsumen yang lebih agresif. Ini semua sudah dan masih dialami oleh masyarakat industriil di negara-negara Barat. Akhirnya

mereka menjadi bosan. Apa lagi yang dimiliki oleh seseorang yang serba punya stereosystem, mobil berlebihan jumlahnya, uang di kantong selalu tebal, TV berwarna, dapur dan peralatan rumah tangga mewah, lantai berkarpet, mobilitasi tinggi karena biaya selalu tersedia dan banyak tempat sudah dikunjungi, kalau bukan jiwa kosong kerdil yang mendambakan ajaran dari dukun, kyai, dan sebagainya? Pada dekade yang lalu, dan bahkan sampai sekarang juga, gejala ini berlaku di dunia barat, di mana para jembel palsu berkelieran ke India, Nepal, Bali, dan sebagainya untuk mencari "peace of mind."

Akhirnya ada suatu masalah yang seringkali diketahui tetapi seringkali pula tidak diperhatikan. Yaitu fungsi pendidik sebagai faktor manusia pelaku yang menentukan dalam proses pendidikan. Baik dalam masyarakat yang sangat sederhana maupun dalam masyarakat yang maju, peranan pendidik sebagai sumber teladan tidak dapat diabaikan. Peribahasa "Mutiara itu biar keluar dari mulut anjing tetap mutiara juga" tidak dapat ditolerir dalam falsafah pendidikan secara Pancasila. *Action morality* (moralitas tindakan) serta *agent morality* (moralitas pelaku) (lihat Oldenquist 1965) tidak dapat dipisah-pisahkan dari diri dan karakter pendidik. Pembinaan generasi muda tidak dapat mengabaikan peningkatan mutu pendidikanya.

Peranan pendidik sebagai pembina generasi muda harus menunjang tercapainya tujuan pendidikan, yang, antara lain, menurut GBHN adalah untuk "..... menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa." Untuk mencapai tujuan ini pendidik perlu menghindari apa yang disebut Whithead 1960 sebagai "inert ideas", yaitu gagasan-gagasan yang hanya sekedar diterima jiwa tanpa dimanfaatkan, diuji, atau dikembangkan menjadi kombinasi-kombinasi baru. Oleh karena "inert ideas" inilah maka sering timbul kejenuhan berpikir yang hanya sekedar menganut isi buku serta kerutinan yang membosankan dan karenanya membuat pendidikan makin jauh dari sasarnya. Dan perlu disadari oleh pendidik, bahwa "inert ideas" ini timbulnya bukan dari siapa-siapa kecuali dari dirinya sendiri. Oleh karena itu daya



kreatif, inovatif, dan cepat memilih alternatif yang tepat perlu dimiliki oleh pendidik. Implikasinya ialah, bahwa pembinaan generasi muda juga tidak bisa dilepaskan dari pembinaan generasi pendidik-pendidiknya. Betapapun rapi dan mantapnya perencanaan pendidikan, kalau pelaku-pelakunya bertindak sebagai robot yang hanya berjalan apabila ditekan tombolnya, hasilnya pasti akan mengecewakan.

### **Peranan Masyarakat**

Nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk pribadi-pribadi anggota masyarakat itu. Selama nilai-nilai ini tidak atau belum sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya nasional sebagai idealisme normatif, maka akan terdapat benturan yang tidak menguntungkan. Hal ini bisa terjadi apabila pelaku-pelaku pembinaan dan pengembangan nilai-nilai nasional tidak atau kurang memahami situasi yang beranekawarna dalam masyarakat Indonesia. Menurut Bachtiar 1976: "Masyarakat kita mewujudkan tidak hanya satu melainkan sejumlah sistim aturan hukum. Masing-masing masyarakat daerah di kepulauan kita diatur oleh suatu sistim aturan hukum tersendiri, aturan-aturan adat masyarakat daerah yang bersangkutan. Ini adalah kenyataan dan kenyataan ini tidak tergantung pada pengesahan atau pengakuan oleh Pemerintah." Dengan demikian kemungkinan benturan, baik yang kecil maupun yang besar, antara nilai-nilai nasional dengan nilai-nilai daerah selalu ada. Namun pada umumnya, kecuali pada peristiwa-peristiwa ekstrim yang sering hampir menggoyahkan nilai-nilai nasional, selalu terdapat jalan keluar yang bersifat toleran dan kompromistis untuk memecahkan problema-problema yang timbul karena perbedaan-perbedaan antara idealisme normatif nasional dan idealisme khas kelompok masyarakat tertentu. Ini berkat tidak saja sifat bangsa Indonesia yang ramah bersahabat, tetapi juga berkat peranan pimpinan masyarakat dan bimbingan dari pihak Pemerintah, dan lebih penting dan dalam dari itu semua ialah adanya pertemuan pendapat untuk tetap berpegang pada landasan pokok nilai-nilai sosial budaya Indonesia yang bersumber pada asumsi dasar yang sama, yaitu UUD 45 dan jiwa Pan-

casilaistis serta kesediaan menerima kenyataan-kenyataan yang Bhinneka Tunggal Ika mewarnai hidup bangsa kita.

Kecuali itu pada tiap masyarakat terdapat apa yang disebut oleh Levi-Strauss 1967 sistem nomenklatur atau terminologi, yaitu himpunan istilah yang menyatakan berbagai hubungan keluarga dan kerabat serta sistem sikap, yaitu sikap yang timbul pada individu dan kelompok individu yang mempergunakan istilah itu dan yang terikat oleh kewajiban dalam antar-hubungan yang terjadi di antara mereka. Dalam pengertian ini, wajarlah apabila sistem nilai nasional sebagai idealisme normatif akan selalu dipandang dari kacamata khas yang terdapat dalam tiap masyarakat di kepulauan kita ini. Bertemunya persesuaian pendapat antara sikap nasional dan sikap masyarakat merupakan tanggungjawab Pemerintah tetapi sekaligus juga harus ditumbuhkan dalam masyarakat untuk dapat menerima nilai-nilai nasional secara sadar dan bertanggungjawab. Penerimaan secara sadar yang paling ideal ialah penerimaan yang dilakukan tanpa kehilangan identitas atau harga diri individu atau kelompok. Kesadaran berbangsa satu hanya akan berarti kalau ia simultan dengan kebanggaan berbangsa satu. Kebanggaan yang sejati biasanya menyangkut dimilikinya hal-hal yang khas oleh individu atau kelompok. Apakah hal-hal itu merupakan hasil ukiran, anyaman, tarian, prestasi olahraga, prestasi seni suara, keindahan alam, dan sebagainya tidak sangat penting diuraikan lebih lanjut. Tetapi pada dasarnya, apabila masyarakat merasa bangga memiliki sesuatu sebagai kekayaannya dan juga diakui sebagai kekayaan nasional, maka tubrukan norma daerah dan norma nasional dapat dihindari. Ini memerlukan pendidikan dan penyebaran informasi tidak saja pada masyarakat yang terbelakang mengenai kekayaan dan kekhasan sosial budayanya, tetapi juga bagi masyarakat yang lebih maju bahwa apapun dan bagaimanapun keadaan suatu aspek sosial budaya kelompok yang terbelakang ini, ia adalah milik nasional dan bukan semata merupakan keprimitifan kelompok yang memilikinya.

Kekhasan yang terdapat pada masyarakat yang berbedabeda itu seyogyanya juga harus dimanfaatkan untuk "menterjemahkan" nilai-nilai sosial budaya nasional tanpa menyimpang



dari arti hakikinya, sehingga dengan demikian sosial budaya nasional menjadi kaya akan warna-warni yang toh mencerminkan suatu idealisme normatif yang sama. Ini hanya akan berhasil apabila melalui pembinaan generasi mudanya masyarakat-masyarakat di Indonesia diajak untuk sejauh mungkin berpartisipasi dengan segala keanekaragaman yang dimilikinya.

### **Beberapa Jalan Keluar**

Indonesia ditandai oleh berlimpahnya sinar matahari di alam yang terbuka. Hanya di kota-kota besar dan pada bagian-bagiannya yang sangat terbatas saja terdapat tata kehidupan tertutup di antara tembok pemisah dan di bawah atap gelap yang memerlukan penerangan khusus dan sistem pengaturan aliran udara dan suhu secara moderen. Manusia Indonesia pada dasarnya manusia yang hidup di alam terbuka, dan karenanya pertemuan dengan orang lain serta keramahatmahannya merupakan suatu syarat baginya untuk mengembangkan eksistensinya.

Sosial budaya Indonesia dengan demikian tidak dapat lepas dari keadaan alam seperti ini. Pemanfaatan berkembangnya sarana komunikasi dan mobilitas seyogyanya ditingkatkan dan dimanfaatkan untuk membina generasi muda untuk makin lebih baik mengenal dan mencintai alam serta sosial budaya masyarakat lain di luar daerahnya. Alam yang serba indah dan terbuka bisa dimanfaatkan untuk belajar hidup sederhana dan menempuh segala risiko serta membangkitkan semangat avonturisme dan pionirisme dalam arti yang positif. Dengan diubahnya sistem liburan sekolah di seluruh Indonesia, perlu ditingkatkan tidak saja pelayanan fasilitas perjalanan secara sederhana, murah, aman, dan tertib, tetapi juga pengadaan sistem penginapan secara prasaja serta terawasi secara bertanggungjawab. Di Jerman Barat, misalnya, sejak menjelang Perang Dunia Ke-I, yaitu pada tahun 1909, gagasan untuk mengadakan jaringan *Jugenherbergen* (penginapan pemuda) timbul untuk memerangi gejala kemandirian generasi muda karena meningkatnya fasilitas materialistis. Kiranya hal ini bisa dirintis di negeri kita ini. Dengan tujuan meningkatkan kecintaan pada



alam, pengertian dan toleransi yang lebih dalam terhadap adat istiadat orang lain, belajar berdiri sendiri dalam keadaan serba sulit dan terbatas, serta dapat juga untuk bekerja bakti untuk masyarakat yang didatangi, kiranya bermanfaat apabila di beberapa tempat yang strategis dapat didirikan semacam "youth hostel" yang kuat tetapi sederhana yang dapat dipakai khusus untuk menampung wisatawan pemuda pada waktu liburan. "Youth hostel" semacam ini hendaknya dikelola oleh pemerintah dengan menempatkan petugas pilihan yang bertanggung jawab dan memenuhi persyaratan yang ketat.

Kecuali itu perlu dirintis usaha atau program nasional untuk memberi didikan praktis dan relevant dengan kebutuhan masyarakat setempat kepada generasi muda yang menganggur atau putus sekolah. Sistem apprenticeship dengan jenjang-jenjangnya sebagaimana yang terdapat di berbagai negara yang maju, mestinya, dengan penyesuaian seperlunya, dapat dilaksanakan secara bertahap di beberapa tempat yang cukup fasilitasnya. Program ini kalau dibebankan seluruhnya kepada pemerintah dalam segala hal pembiayaannya, kiranya akan menimbulkan masalah ketergantungan dan yang lebih jelek lagi malah mungkin menimbulkan sistem birokrasi baru. Oleh karena itu inisiatif swasta perlu dikembangkan. Di beberapa daerah yang sudah ada usaha-usaha swasta semacam itu, uluran tangan dari pemerintah sangat diperlukan.

Masih banyak lagi jalan yang dapat ditempuh untuk membina generasi muda dari segi sosial budaya. Napitupulu 1978 menyebut antara lain penggalian dan pengembangan *olahraga asli*. Pada waktu jaman Jepang kita melihat betapa pihak penguasa Jepang memakai berbagai cara untuk meningkatkan olahraga asli ini. Misalnya perang-perangan gajah, di mana seorang naik dan duduk di atas empat lengan dua orang yang disilangkan dan diletakkan pada bahu seorang lain di depannya, dan di mana satuan ini merupakan seekor gajah dan bersama-sama dengan gajah lain menyerang pasukan gajah lawan untuk menumbangkan bendera di puncak tiang bambu. Di samping olahraga asli, pengembangan olahraga "internasional" untuk mencapai prestasi yang tinggi perlu ditingkatkan.

Dalam menggali olahraga asli sebagai kekayaan budaya nasional itu diperlukan dana, dan, yang lebih penting, peranan aktif para kreator dan penggali potensi olahraga dan organisator yang baik serta penuh dedikasi. Kalau kita lihat di kampung-kampung jauh dari kota besar, sebenarnya banyak keaslian-keaslian bentuk kegiatan setengah permainan setengah olahraga, serta sifat kegotongroyongan yang bisa dimanfaatkan dan diarahkan untuk keperluan pembinaan generasi mudanya.

Suatu contoh yang menarik perlu disebutkan di sini. Belum berapa lama telah diadakan ujian tari Jawa di Museum Universitas Cenderawasih Jayapura, di mana di samping tarian secara penuh diuji, juga gerak dasar tari pria dan tari wanita Jawa diuji secara teliti. Ternyata hal ini telah dipetik sebagai pelajaran oleh seorang putra daerah untuk membakukan gerak dasar tari dari beberapa daerah di Irian Jaya. Pada waktu peringatan HUT RRI Jayapura hanya tiga bulan sesudah ujian tari Jawa itu, oleh putra daerah ini dipentaskan berbagai gerak dasar tari daerah tersebut, yang mendapat sambutan cukup memuaskan dari penonton asli maupun pendatang dari luar Irian Jaya. Sampai saat ini, dalam waktu yang relatif sangat singkat, yaitu empat bulan sesudah putra daerah tersebut belajar dari "melihat" ujian tari Jawa itu, telah dibakukan gerak dasar tari dari tujuh daerah Irian Jaya berupa notasi berbentuk stensilan. Ini merupakan gambaran nyata bahwa pembinaan generasi muda dapat dilakukan sekaligus untuk membina kebudayaan asli. Khazanah kebudayaan asli masih banyak yang belum digali. Dalam beberapa hal, penggalian ini bisa berupa penyajian persis seperti yang dianggap asli, atau, demi peningkatan mutu, berupa modifikasi dan kodifikasi seperti yang dilakukan di Irian Jaya di atas.

## PENUTUP

Biarpun secara teoritis ilmiah kita mungkin dapat memberi batasan pada nilai-nilai sosial budaya Indonesia melalui pengumpulan data dan penganalisaan serta prosedur ilmiah lainnya, tanpa asumsi dasar yang kuat dan terarah sebagai pegangan, identitas sosial budaya yang ditemukan seperti demikian hanya akan bermanfaat secara akademis dan layak dipolemikkan

belaka. Di samping itu kiranya kita perlu waspada, bahwa apa yang disebut ilmiah itu selalu erat dengan budaya manusia. Tanpa mengaitkan unsur manusia dan budayanya dalam disiplin ilmu pengetahuan apa pun, kita akan menempatkan ilmu lebih tinggi dari pada manusia yang mengembangkannya (lihat misalnya Znaniecki 1963).

Suka atau tidak suka, UUD 45 dan Pancasila telah terbukti sampai saat ini sebagai nilai-nilai normatif yang menjadi pegangan bagi sosial budaya Indonesia. Oleh karena itu pembinaan generasi muda dipandang dari aspek sosial budaya tidak bisa lain kecuali dengan mempergunakan kacamata sosial budaya yang bersumberkan pada nilai-nilai normatif nasional, dan ini harus dilakukan sejak generasi muda itu masih dalam tingkat umur yang sangat awal.

Pendidikan yang ditujukan untuk membina sikap moderet perlu dimulai sejak anak lepas dari susuan ibunya. Ini memberi beban tanggungjawab kepada orang tua agar selalu berpikir dengan jernih, dan menghindari "tantrums" atau ledakan emosi yang berlebih-lebihan, yang pasti akan mempengaruhi bahkan mungkin ditiru oleh anaknya. Program radio, TV, serta media massa lain perlu meningkatkan daya analitis dan diskusioner terarah dengan tahapan-tahapan yang serasi, sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa belajar mendahulukan fungsi daya pikirnya daripada emosinya. Sikap moderat hanya bisa dimiliki oleh orang yang berpandangan luas, dan pandangan luas selalu memerlukan persentuhan dengan alam pikiran orang lain dengan penuh pengertian dan toleransi, terbuka, dan sikap rasional.

Forum pertukaran pendapat dalam semua bidang keahlian (pertanian, pertukangan, kerajinan tangan, dsb.) seyogyanya ditingkatkan melalui pengaturan yang tepat agar forum tersebut mengenai sasaran, dan agar ekses-ekses berupa pemikiran liberalistis dan dialektis tanpa mampu menghasilkan cara pemecahan praktis dan bermanfaat bagi umum dapat dihindari. Nilai kerja kasar tanpa rasa malu perlu ditanamkan sejak anak masih kecil di keluarga melalui program gotong royong di kampung, RT, RW, dan sebagainya.



Kebanggaan sebagai warga negara Indonesia perlu ditingkatkan melalui program pembinaan bakat dan prestasi serta peningkatan mutu nilai sosial budaya yang khas terdapat pada masyarakat. Dalam pengertian ini istilah "primitif" hanya berlaku untuk segi teknologi atau "finishing"-nya saja. Oleh karena itu segi-segi potensiil yang terdapat di daerah-daerah terbelakang perlu dipelajari dan ditingkatkan baik teknologinya maupun pemasaran/penyebarannya. Prestasi sebagai penyelesaian tugas dengan sebaik-baiknya perlu dibina.

Fungsi pendidik, apakah ia berupa orang tua, guru, dosen, kepala kantor, media massa, perlu dibina nilainya sebagai pemberi contoh. Di Indonesia, apabila ajaran atau contoh dari pendidik baik tetapi pendidik itu sebagai *agent* (pelaku) tidak baik, pendidikan sebagai proses pemindahan nilai-nilai akan terganggu kelancarannya. Bahkan di kota-kota kecil dan di daerah-daerah pedalaman, hal semacam itu malah akan bisa merusak sikap generasi muda sama sekali.

Buku-buku bacaan bagi anak-anak yang makin meningkat minat bacanya perlu diarahkan isinya untuk maksud membina mereka ke arah idealisme normatif nasional. Bahan-bahan bacaan tentang suri teladan tingkah laku serta budi pekerti perlu diutamakan daripada sifat kemisterian atau kedetektifan yang banyak menandai banyak buku bacaan seperti itu. Kepahlawanan dan kemenangan kebajikan terhadap kejahatan seyogyanya tidak dicampur-adukkan dengan penampilan bentuk ragawi serta sugesti hubungan kelamin sebagaimana sering nampak pada sementara media massa yang juga dibaca oleh anak-anak. Film-film yang berisi suri teladan hidup perlu ditingkatkan penyebarannya.

Masalah pembinaan generasi muda tidak dapat dibebankan pada salah satu atau beberapa Departemen saja. Seluruh aparat pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab sepenuhnya sebagaimana semua pemain musik pada suatu orkes simponi yang ingin menghasilkan lagu yang baik.

Kesempatan untuk membina generasi muda dalam dimensi waktu dan hidup manusia memang tidak ada batasnya. Tetapi apabila dalam Pelita III kita ingin melihat agar pembinaan generasi muda dilaksanakan secara berhasil sejauh mungkin, maka Pemerintah benar-benar harus menjawab tantangan ini. Ia akan menghadapi pertanggung jawaban tidak saja pada akhir periode jabatannya, tetapi juga pada generasi-generasi yang akan datang sebagai penanam tonggak sejarah yang betul atau keliru.

Masa kini, Bangsa Indonesia hidup dalam situasi di mana segala macam masalah membebani pemimpin-pemimpinnya. Secara simultan. Mempertengkarkan prioritas hanya akan menghasilkan kesimpang-siuran pendapat. Tetapi baiklah saya akhiri prasaran ini dengan truisme yang sudah lama dikenal: Barang siapa dapat membina generasi muda dengan sebaik-baiknya, ia akan mampu membina masa depan bangsanya.

#### BACAAN

1. Bachtiar, Harsja W., "Hukum di Masyarakat Indonesia", dalam *Berita Antropologi*, VIII/27:3—17. Jakarta : FSU1
2. Van Eerde, J.C., *Inleiding tot de Volkenkunde van Nederlandsch Indie*, 1920 Haarlem
3. Gerbrands, A.A., *Wow-Ipits*, The Hague : Mouton 1967a
4. Gerbrands, A.A., *The Asmat*, New York: The Museum of Primitive Art. 1967b
5. Huxley, T.H. dan Julian Huxley, *Evolution and Ethics (1893-1943)*, London : 1947 The Pilot Press Ltd.
6. Jowett, B., translator : Plato, *The Republic*, dalam Oldenquist 1892
7. Katz D. dan K. Braly, "Racial Stereotypes of one hundred college students", dalam *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 1933 27:127-143
8. *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, 1978 11-23 Maret 1978. Surabaya : Penerbit Express
9. Levi-Strauss, Claude, *Structural Anthropology*, New York : Anchor Books 1967
10. Linton, Ralph, *The Study of Man*, New York : Appleton-Century 1936
11. Lubis, Mochtar, "Ceramah Budaya Mochtar Lubis", dalam *Sinar Harapan* 1977 XVI/5071, 9 April 1977

## ANALISA

12. Mosca, Gaetano, *The Ruling Class*, New York : McGraw-Hill  
1939
13. Napitupulu, W.P., "Kebijaksanaan Keolahragaan di Indonesia", dalam  
1978 *Prisma*, VII/4:17-24.
14. Oldenquist, A., Ed., *Readings in Moral Philosophy*, Boston : Houghton  
1965 Mifflin Company
15. Onghokham, "Angkatan Muda dalam Sejarah dan Politik", dalam *Prisma*,  
1977 VI/12:15-24
16. Pendit, Njoman S., *Bhagavadgita*, Departemen Agama R.I. : Lembaga  
1967 Penyelenggara Penterjemah dan Penerbit Kitab Suci Weda  
dan Dharmmapada
17. Pike, K.L., "Toward a Theory of the Structure of Human Behavior", dalam  
1956 *Estudio Anthropologicos publicados en homenaje al doctor  
Manuel Gamio*, Mexico : Sociedad Mexicana de Anthropologia
18. Budianta, Eka, "Dalam Membangun Generasi Muda Pembinaan Orang Tua  
1978 Juga Perlu" dalam *Sinar Harapan*, XVII/5312, 8 Februari 1978
19. Sudjoko, "Kebudayaan Massa", dalam *Prisma*, VI/6:3-12  
1977
20. Sylado, Remy, "Musik Pop Indonesia : Satu Kebebalan Sang Mengapa" dalam  
1977 *Prisma*, VI/6:23-31
21. Toffler, Alvin, *Future Shock*, New York : Bantam Books  
1972
22. Whitehead, Alfred Nort, *The Aims of Education*, New York : Mentor Book  
1960
23. Znaniecki, Florian, *Cultural Sciences*, Urbana : Illini Books  
1963



# PEMBINAAN GENERASI MUDA DI BIDANG SOSIAL POLITIK\*

H. Roeslan ABDULGANI

I. Membicarakan masalah generasi muda sebenarnya membicarakan persoalan diri kita sendiri. Artinya juga membicarakan masalah generasi tua. Sebab "tua" dan "muda" adalah sekedar penentuan dimensi waktu. Dan perbedaan usia. Juga perbedaan pengalaman. Ia juga menyangkut masalah manusia dengan kodrat kemanusiaannya, dengan pembawaannya, dengan pengaruh orang tuanya semasa kecil dan remaja. Dan semasa tumbuhnya serta mendewasanya, juga dengan pengaruh situasi dan kondisi lingkungan pergaulan yang mengelilinginya; juga dengan desakan situasi dan kondisi sosial-ekonomi dan politiknya.

II. Karena itu, siapapun juga dari generasi "tua" atau yang sedang "menua", yang hendak membicarakan masalah generasi muda, ia mau-tidak-mau harus menempuh "retrospeksi" dan "introspeksi". Yaitu menengok ke belakang sebentar ke masa silam dan lampau, sambil memandang setajam-tajamnya dalam diri sendiri tentang segala apa, yang ia sendiri dulu alami dan kerjakan. Bagaimana ia beraksi dan ber-reaksi atas segala tantangan jaman yang melingkarinya; sambil selalu memperingatkan dirinya sendiri untuk jangan ber-pretensi

---

\* Kertas kerja pada *Lokakarya Nasional Pembinaan Generasi Muda*, Jakarta 4—7 Oktober 1978

seakan-akan cara dan pengalamannya dulu itu adalah yang paling benar'', dan karena ''harus diwariskan'' begitu saja secara mentah-mentah kepada generasi muda sekarang. Sebab setiap generasi biasanya menghadapi situasi dan kondisi yang berlainan. ''Zeit-geist''nya pun—yaitu ''Semangat Jaman''-nya-pun, sering kali sangat berlainan. Karenanya maka watak dan pandangan generasi muda pun seringkali berlainan dari watak dan pandangan generasi tua.

III. Fenomena ini bukan alienasi. Alienasi baru terjadi kalau generasi muda, karena berbagai sebab dan faktor, telah terputus tali kesinambungannya dengan generasi tua. Atau kalau generasi muda telah terjebol akar-akar kejiwaan dan gaya-hidupnya dari bumi sosial-budaya dan sejarahnya generasi tua. Selama perbedaan antara generasi muda dan generasi tua itu hanya sekedar mengenai perbedaan cara menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bersama, sedangkan kedua-dua generasi itu mempunyai Dasar dan Tujuan yang sama, maka fenomena perbedaan pandangan dan pendapat tentang cara itu tidak dapat dikwalifisir sebagai alienasi atau ''uprooted''. Sebaliknya fenomena demikian itu, dalam batas-batas tertentu, adalah sehat. Ia menunjukkan bahwa generasi muda masih ''hidup''. Hidup dalam arti, bahwa jiwa dan inisiatipnya masih dinamis sesuai dengan kodrat dan watak-alamiahnya.

IV. Perbedaan pandangan dan pendapat demikian seyogyanya diperkecil atau kalau dapat dihilangkan sama sekali. Itulah salah satu fungsi pembinaan generasi muda oleh pihak generasi tua atau yang sedang ''menua''. Pembinaan demikian bersifat sebagai penunjuk dan penuntun jalan kepada generasi muda, berdasarkan pengalaman-pengalaman generasi tua; dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman generasi muda sendiri, yang sekalipun tentunya masih sedikit dan masih terbatas, tidak boleh di kesampingkan begitu saja. Tetapi harus diingat, terutama oleh generasi muda kita, bahwa pengalaman generasi tua adalah tidak terbayar nilainya. Karena itu tidak baik untuk diabaikan begitu saja. Dalam pembinaan ke arah memperkecil perbedaan pendapat dan pandangan mengenai cara ter-

sebut, maka persuasi harus digunakan semaksimal mungkin. Sedangkan "coercion", hendaknya digunakan seminimal mungkin.

V. Ada berbagai cara memandang masalah pertumbuhan generasi.

1. Kita dapat memandangnya secara individuil-vertical. Yaitu pertumbuhan perkembangan setiap individu dari jaman kanak-kanak, melalui ke-remajaan dan kepemudaannya sampai men-dewasa. Ilmu psikologi, ilmu paedagogi dan ilmu socio-genetica banyak menyoroti pertumbuhan dan perkembangan itu. Dalam periode kepemudaannya, dinamika individu biasanya meningkat. Fenomena itu dikenal dalam bahasa Jerman sebagai "Sturm und Drang Periode" atau "die Wander Jahre"; yaitu periode "taufan dan desakan", dan periode "mengembara". Tidak hanya suka mengembara secara physik, tetapi juga secara bathiniah dan dalam angan-angan; sambil meng-idealisir hidup dan kehidupan penuh dengan imajinasi dan dengan cita-cita yang romantis dan herois.

2. Kita dapat memandangnya juga secara ke-sebayaan horison-tal. Artinya dalam kelompok-kelompok pemuda sebaya. Dan kita akan melihat bahwa remaja dan pemuda, yang dalam face "Sturm und Drang" dan fase "Wander Jahre" tersebut akan mengelompok dalam berbagai perkumpulan, sesuai dengan watak, bakat dan hobbynya.

3. Kita dapat melihat pula masalah kepemudaan itu dari sudut "Zeitgeist" serta situasi dan kondisi sosial-ekonomi dan politik yang sedang mengelilingi mereka. Apabila masyarakat yang mengelilinginya sedang "demam" karena ketegangan-ketegangan sosial dan kegoncangan-kegoncangan politik um-pamanya, maka generasi muda, yang secara individuil menurut kodratnya sedang mengalami demamnya "Sturm und Drang" dan "Wander Jahre" dalam diri pribadinya masing-masing, akan mengalami demam berganda. Demam individu berkait dengan demam sosial-ekonomi dan sosial-politik.



VI. Generasi-generasi tua, yang mendahului generasi sekarang, baik generasi 1908, 1928 dan 1945, semuanya lahir di tengah-tengah demam bergandanya individu dan sosial-politik demikian. Generasi 1908 dipengaruhi oleh akibat "open door policy" dan "ethical policy"-nya Pemerintah kolonial Hindia-Belanda sebelumnya; juga oleh pergolakan di beberapa bagian dari benua Asia lainnya melawan kolonialisme, dan juga oleh akibat perang Dunia Ke-I. Nasionalisme mereka masih dalam taraf pertumbuhannya. Generasi 1928 dipengaruhi oleh "iron-fist policy"-nya Pemerintah kolonial; yang dengan tangan besi menumpas militansi nasionalisme mereka. Sekalipun demikian militansi nasionalisme Generasi 1928 itu telah menegaskan dasar dan tujuan Indonesia Merdeka yang mulia diperjuangkan secara terbuka; dan yang mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Generasi 1945 dipengaruhi oleh penindasan militerisme Jepang, yang karena kalah perangnya, memberi kesempatan bagi nasionalisme Indonesia untuk meledak dengan penuh patriotisme dan heroisme memproklamirkan kemerdekaan dan membela dan mempertahankannya.

VII. Jelaslah kiranya, bahwa generasi-generasi terdahulu itu lahir di tengah-tengah demam bergandanya individu dan sosial-politik serta sosial-ekonomi. Juga dengan lahirnya generasi 1966. Kini sebagian dari generasi 1966 itu sudah mulai masuk ke dalam "inner circle"-nya kekuasaan Negara dan Pemerintah. Ada juga yang masih tetap di tengah-tengah masyarakat, dan naik pula ke tingkat pimpinan lembaga-lembaga masyarakat. Generasi 1966 inipun sedang menghadapi generasi yang 15 a 20 tahun lebih muda dari dirinya, dan yang sedang mulai "muntup-muntup" di permukaan lapisan kepemimpinan, dan siap menunggu waktu untuk memasuki "inner circle" kekuasaan Negara dan Pemerintah, apabila generasi 1966 yang kini sudah berusia sekitar 40 tahunan atau lebih dalam waktu tidak lama lagi akan bergeser ke lapisan lebih tinggi lagi dari kekuasaan Negara dan Pemerintahan.

VIII. Tidak dapat disangkal, bahwa dewasa ini terasa ada "demam" dalam masyarakat kita. Disatu pihak ada "demam entusiasme" pembangunan. Di lain pihak ada "demam des-illusi"

karena ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomis sebagai akibat sampingannya pembangunan itu. Apabila suhu "demam des-illusi" itu jauh lebih tinggi dari suhu "demam entusiasme" pembangunan, maka ia akan merupakan krisis-latent di bawah permukaan masyarakat. Ia mungkin akan mengakibatkan gejolak-gejolak sosial-ekonomis dan politis, apabila tidak ditanggulangi. Apalagi, kalau dalam praktek pelaksanaannya, pembangunan yang dimaksud oleh kita semua dan sudah ditegaskan dalam berbagai GBHN sebagai pembangunan yang "overall", terlalu terarah kepada "economy building" yang materialistis dan GNP-sentris saja; mengabaikan perlunya "transformasi sosial" dalam usaha pembangunan itu menuju ke suatu masyarakat yang lebih maju dan manusiawi dari jaman kolonial dan feodal, dan yang sama sekali tidak memperhatikan kelanjutan "nation-and character building". "Demam des-illusi" itu dapat menjurus ke arah sinisme dan apatisme, kalau dibiarkan terus-menerus. Ia akan merupakan ladang-subur bagi sabotase-sosial dan subversi.

IX. Mengkaitkan masalah generasi muda kita dengan masalah pembangunan itu, maka kita harus juga melihatnya masalah ini dari sudut perkembangan demografis; di mana menurut sumber-sumber statistik lajunya jumlah penduduk meningkat pula dalam golongan kanak-kanak, para remaja dan para pemuda kita, dibanding dengan meningkatnya golongan dewasa. Perkembangan jumlah generasi muda, yang terus meningkat itu, menimbulkan masalah yang terkenal sebagai "the revolution of rising demands", terutama di bidang kesempatan memperoleh pendidikan dan kesempatan memperoleh pekerjaan. Ia menimbulkan pula ketegangan-ketegangan sosial, karena garis pemisah antara minoritas elite yang kaya dan mayoritas rakyat yang miskin membelah juga ke lapisan generasi muda. Selain itu, maka secara sosiologis dan sociografis, jelas terlihat perbedaan pola hidup antara generasi muda di desa-desa dan yang di kota-kota. Apalagi dengan yang ada di "metropolitan" seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan sebagainya. Tradisi agraris yang belum terombak sepenuhnya, tingkat hidup yang masih rendah, kesempatan yang sangat terbatas untuk mendapat lapangan kerja nontradisionil dan pen-



didikan, serta watak setiap individu generasi muda yang dipengaruhi oleh "Sturm und Drang" dan "Wander Jahre", kesemuanya itu mendorong sebagian dari tenaga kerja muda di desa-desa untuk berurbanisasi ke kota-kota; mencoba mengadu nasibnya di tengah-tengah penduduk elite-mengengah dan super-elite dengan generasi mudanya yang elitis pula dalam watak dan pola penghidupannya.

X. Sensus tahun 1971 menunjukkan, bahwa jumlah pemuda yang ada di kota-kota adalah 6,7 juta; sedang yang ada di desa-desa adalah 26,8 juta. Atau dengan bandingan 1 di kota lawan 4 di desa-desa. Dari jumlah yang ada di kota-kota itu maka hampir 50% masih duduk dalam bangku sekolah. Sedangkan lainnya sudah masuk ke masyarakat. Artinya sudah bekerja atau masih menganggur. Adapun dari jumlah pemuda yang ada di desa-desa itu 32% atau kurang lebih 1/3 yang masih sekolah; sedangkan lainnya yang tergolong besar jumlahnya, atau sudah bekerja, atau merupakan angkatan kerja yang masih menganggur atau "semi-nganggur". Angka-angka ini menunjukkan betapa desa-desa di luar kota merupakan gudangnya "reserve army of cheap labour"; suatu gudang "angkatan cadangan bagi tenaga buruh murah". Angkatan cadangan tenaga buruh yang murah ini kebanyakan terdiri dari generasi muda atau generasi yang sedang mendewasa. Jadi, tenaga-tenaga yang pada umumnya berada dalam tingkat pertumbuhan yang mestinya paling dinamis; kalau makanan dan kesehatannya sejak kecilnya terpelihara baik-baik.

XI. Generasi muda di kota-kota berada dalam keadaan yang jauh berbeda dengan di desa-desa. Mereka hidup di tengah-tengah dinamikanya masyarakat kota, dengan segala deru dan debunya pembangunan meteriil. Seperti sudah saya katakan di atas, garis-pemisah antara minoritas elite kota dan mayoritas rakyat biasa membelah juga lapisan generasi muda di kota-kota. Jelasnya -- dan mungkin ini agak "over-exaggerated" sedikit-- ada generasi muda elite di daerah "gedong" dan ada generasi muda rakyat di kampung-kampung dan di lorong-lorong. Biasanya generasi muda elite mempunyai hubungan dekat dengan para penguasa. Juga dengan dunia luar, dengan



''sepotong'' dunia internasional yang bercokol di kota-kota besar; dan dengan bangsa-bangsa asing lainnya. Mereka menghadapi suatu situasi internasional yang baru sama sekali bagi mereka. Mereka ada yang berkontak di bidang bisnis dan finek dengan generasi mudanya bangsa-bangsa lain; di mana generasi mudanya Dunia Barat, Jepang dan lain-lain nampak seakan-akan sangat ''over-generous'', nampak sangat ber-''budi-baik''; ringan dalam hati dan cekatan dalam sikap untuk memberi ''grant, aid and loan'' terutama di bidang finek kepada kita, untuk keperluan ''modernisasi''.

XII. Situasi baru ini dapat melahirkan suatu generasi baru elite di kalangan kita, yang kurang waspada. Mereka mudah terlepas dari hubungan masyarakat banyak, dan gampang terseret dan terjirat dalam pola-hidup konsumptip mewah dalam keperluan kontaknya dengan dunia luaran yang ''modern'' itu. Mereka mudah mengalami ''alienation'' dan lekas ''uprooted''. Nasionalisme dan patriotisme generasi baru kita yang elite tadi itu mau-tak-mau terpengaruh oleh situasi dan kondisi baru ini, dengan membanjirnya modal dan teknologi asing dewasa ini. Bidang kebudayaan-pun tidak lepas dari pengaruhnya banjir itu.

XIII. Dalam pada itu kita tidak boleh menutup mata adanya proses ''meluntur'' nya semangat dan jiwa dalam barisan setiap generasi. ''Meluntur'' dalam arti wajar dan alamiah. Lebih-lebih, kalau generasi muda itu mendewasa dan menjadi tua. Tanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga yang ia bentuk; serta pemikiran selanjutnya untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, yang makin hari makin sulit situasi dan makin mahal biayanya; seringkali menyebabkan di kalangan barisan generasi yang mendewasa itu menurunnya perhatian mereka bagi terlaksananya cita-cita nasionalisme dan patriotisme-nya semula. Faktor-faktor inilah yang mungkin sekali menimbulkan kesan, bahwa nasionalisme dan patriotisme Indonesia dewasa ini, juga di kalangan Angkatan Mudanya, mengalami pencairan dalam jiwanya, dan kemunduran dalam kualitasnya. Dalam pada itu kiranya masih cukup kelompok-kelompok Angkatan Muda kita, baik di kota-kota besar dan kecil, yang masih memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme

yang tinggi; terutama dalam kesatuannya dengan humanisme, kerakyatan, keadilan sosial dan religiositas-nya Pancasila kita.

XIV. Berdasarkan uraian deskriptik dan analitik di atas, maka masalah "Pembinaan Generasi Muda di bidang sosial-politik" hendaknya didekati dengan jalan pikiran di bawah ini :

1. Baik GBHN tahun 1978, maupun Pidato Kenegaraan Presiden di depan DPR pada tanggal 16 Agustus yang baru lalu, telah memberikan bekal dan arah yang mendasar dan menyeluruh bagi pembinaan generasi muda kita.
2. Sasaran yang menonjol, dan yang hendak di-prioritas-kan, adalah apa yang dikemukakan oleh Presiden di muka DPR dalam usaha pemerataan yang adil melalui delapan jalur, terutama jalur keenam, yang berbunyi : "pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita".
3. Apabila jalur ini dikaitkan dengan adanya "gudang cadangan tenaga kerja yang murah dan berlimpah-limpah" dari Generasi Muda di desa-desa, serta adanya "cadangan tenaga pemikir" dari Generasi Muda di kota-kota maka apakah tidak dapat dipikirkan untuk merencanakan usaha penangan-pembangunan "public works" oleh tenaga pemuda-pemuda kita dalam bentuk semacam "brigade-brigade pembangunan" dan "brigade-brigade zen"; dengan meningkatkan a la kadarnya ketrampilan teknis sesuai dengan keperluan yang mendesak dan praktis. Dengan begini watak padat-karya dapat terpelihara terus. Penyertaan tenaga-tenaga pemuda itu harus disertai dengan imbalan yang cukup untuk hidup, dan yang "zakelijk bussiness-like". Cara ini pernah dipraktekkan di Yugoslavia dan menurut kabar juga di Jepang sesudah perang, dalam pembangunan jalan-jalan raya secara massal dan secara besar-besaran, dengan persiapan-persiapan yang matang; tidak hanya persiapan di bidang penyediaan alat-alat besar dan kecil, tetapi juga di bidang persiapan penyediaan biayanya dan di bidang pengerahan tenaga Generasi Muda. Di beberapa daerah di Tanah Air kita, hal

demikian sudah pernah dilaksanakan, tapi baru di tingkat lokal/provinsial secara terbatas.

4. Sudah barang tentu "public works" yang hendak dijadikan sasaran untuk penanganan secara demikian itu, dapat diperluas jenisnya, dan diperinci proyek-proyek kelanjutannya. Tetapi kesemuanya bukan bersifat pengerahan tenaga secara suka-rela saja; melainkan kesuka-relaan itu harus dikaitkan dengan imbalan yang "zakelijk bussiness-like".

5. Pengerahan tenaga pemuda melalui jalur pemerataan keenam seperti yang telah dikemukakan oleh Presiden dalam pidatonya di DPR yang baru lalu itu, seyogyanya disertai dengan intensifikasi pendidikan politik, berdasarkan Pancasila. Juga di bidang kepemimpinan (leadership) dan "moral social conduct", berdasarkan P4.

Pendidikan politik demikian tidak lain daripada mengarah ke kaderisasi Pancasila. Dan bukan ke arah kaderisasi pengkotak-kotakan ideologi tertentu. Penanganan masalah sosial-ekonomis yang sangat mendesak dewasa ini (yaitu terutama pengangguran tenaga pemuda) dengan begitu kita dasari dengan dasar pendidikan politik yang sehat, yang diharapkan dapat membina kembali kebanggaan pemuda dalam partisipasi nyata di bidang pembangunan, dalam kerangka umumnya kebanggaan nasional kita.

6. Pengorganisasiannya gagasan pembinaan di bidang sosial-politik demikian harus disatu pusat; yang mempersatukan semua golongan pemuda kita; dan yang dengan dasar dan tujuan yang jelas dapat membangkitkan "demam entusiasme pembangunan" sambil meminimalkan "demam des-illusi"-nya disementara kalangan pemuda kita.

XV. Pemikiran dan gagasan di atas jauh dari lengkap dan sempurna. Dan disusun secara tergesa-gesa di tengah-tengah kesibukan dan kewajiban yang mendesak; terutama karena bersamaan dengan penataran di tingkat nasional yang sedang dikerjakan di Bogor. Karena itu hendaknya dimaklumi adanya kekurangan-kekurangan dan mungkin juga kekeliruannya dalam mendekati persoalannya.



## ANALISA

### KEPUSTAKAAN

1. Bard, Ray dan lain-lain, *Planning for Change* (Washington : Educational, Training and Research Sciences Corp., 1971)
2. Batten, T.R., *Training for Community Development* (London : Oxford University Press, 1965)
3. GBHN, Ketetapan MPR RI Nomoer IV/MPR/1978
4. Greenblat, Cathy S. dan Duke, Richard D., *Gaming Simulation. Rationale, Design and Applications* (New York : Halsted Press, 1975)
5. Lengrand, Paul, *An Introduction to Lifelong Education* (UNESCO, 1970)
6. Manning, Peter K. dan Marcello, *Youth and Sociology* (Englewood Cliffts : Prentice Hall, 1972)
7. Moser, G.A., *Survey Methods in Social Investigation* (Heinemann Educational Books, 1961)
8. Ohlinger, John, "Listening Groups", dalam *Mass Media in Adult Education* (Boston, 1967)
9. Saville, A.H., *Extention in Rural Communities* (Oxford Tropical Handbooks, 1970)
10. Skinner, Charles E., *Essentials of Educational Psychology* (Englewood Cliffts : Prentice Hall, 1958)
11. Soerjono Soekanto, *Sosiologi. Suatu Pengantar* (Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1970)

# SUATU PANDANGAN TENTANG TEKNIK PEMBINAAN GENERASI MUDA

L. HARIANDJA\*

## PENDAHULUAN

Pembahasan ini bertitik tolak pada hakekat pemuda sebagai manusia muda yang sedang tumbuh dan berkembang. Pemuda memiliki suatu karakteristik tersendiri dalam pertumbuhan dan perkembangannya menuju kedewasaan. Karakteristik itu, secara sosio-psikologis, sosio-paedagogis, maupun perkembangan fisik pada umumnya dialami oleh setiap orang dalam masa perkembangan usia muda. Proses sosialisasi dan pembentukan pemuda dalam masyarakat menuju ke status dewasa dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan seperti status sosial-ekonomis keluarga, keagamaan, adat-istiadat dan lain-lain. Proses perkembangan itu juga dipengaruhi oleh modernisasi dan mobilitas-mobilitas dalam masyarakat seperti urbanisasi yang sangat deras pada waktu sekarang. Sifat-sifat ingin bebas dan rasa ketidakmenentuan pada periode perkembangan pemuda untuk mendapatkan norma-norma dan nilai-nilai hidup memerlukan bimbingan yang seksama. Perkembangan dewasa ini tidak hanya dapat diungkapkan dengan istilah-istilah negatif saja, karena perkembangan baru ini meninggalkan situasi yang lama dan dari kita diminta suatu kewajiban untuk mengadakan rekonstruksi. Para pemuda harus menyediakan diri kepada situasi pembangunan

---

\* L. Hariandja adalah seorang ahli pendidikan dan anggota *Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

dewasa ini dengan suatu cara yang dapat dicocokkan dengan perkembangan dewasa ini. Kita harus mencari suatu cara integrasi baru untuk saling mengerti dan bekerjasama. *Tidak ada penyesuaian otomatis perlu perencanaan.* Penyesuaian kepada masa pembangunan, tidak mungkin secara otomatis. Para pemuda, organisasi-organisasi pemuda perkumpulan-perkumpulan pemuda, haruslah berintegrasi dan mengadakan perencanaan dalam rangka pembinaan generasi muda.

Untuk itu perlu kiranya dipikirkan suatu pendekatan pembinaan generasi muda yang sesuai dengan keadaan dan karakteristik pemuda itu sendiri.

Adapun norma-norma dan nilai-nilai hidup yang hendak dimiliki oleh kaum muda untuk mewujudkan kewarganegaraan yang baik telah jelas yakni berdasar atas Pancasila dan UUD 1945. Dan perwujudan itu telah digariskan dalam GBHN seperti berikut :

”Pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan Nasional dengan memberikan bekal ketrampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang sehat, sehingga memungkinkan kreativitas generasi muda berkembang secara wajar dan bertanggungjawab. Dalam rangka itu perlu ada usaha-usaha guna mengembangkan generasi muda untuk melibatkannya dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara serta pelaksanaan pembangunan Nasional. Pengembangan wadah pembinaan generasi muda seperti sekolah, organisasi fungsional pemuda seperti antara lain KNPI, pramuka, organisasi olah raga dan lain-lain perlu terus ditingkatkan. Untuk itu antara lain diusahakan bertambahnya fasilitas dan sarana yang memungkinkan pengembangan kepemudaan. Perlu diwujudkan suatu kebijaksanaan Nasional tentang kepemudaan menyeluruh dan terpadu.”



Untuk mencapai maksud seperti tersebut di atas, dalam pembinaan generasi muda perlu diusahakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara teratur dan sistematis. Kegiatan-kegiatan harus mendukung tercapainya cita-cita itu. Kegiatan-kegiatan itu misalnya : Pemberian bekal ketrampilan-ketrampilan kepada kaum muda untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan, pembentukan kader-kader kepemimpinan, kegiatan-kegiatan olah raga dan lain-lain. Sedang penentuan urutan prioritas kegiatan akan dibuat dalam perencanaan yang didasarkan atas hasil identifikasi keadaan pemuda menurut daerah atau keadaan setempat. Misalnya urutan prioritas itu akan berbeda di Daerah Pedesaan dan Daerah Perkotaan.

Teknik pembinaan seperti diuraikan dalam tulisan ini lebih sesuai dengan pembinaan pemuda melalui jalur kemasyarakatan, sebab pembinaan melalui jalur sekolah dan intra kampus telah mempunyai program formil yang melembaga. Sedang yang perlu mendapat perhatian adalah pembinaan melalui jalur kemasyarakatan. Dan menurut pandangan penulis pembinaan menurut jalur ini seyogianya dilaksanakan menurut prinsip Pendidikan Luar Sekolah. Agar usaha pembinaan itu berjalan secara sistematis dan teratur, cara pendekatan ini terdiri dari beberapa langkah berikut :

1. Hubungan masyarakat.
2. Usaha penggugahan minat dan penyadaran pemuda akan kebutuhan dan masalah-masalahnya.
3. Identifikasi situasi pemuda.
4. Penentuan sumber-sumber dan potensi-potensi.
5. Penyusunan rencana dan program pembinaan.
6. Pelaksanaan.
7. Evaluasi.

Setiap langkah dalam pendekatan itu, bukanlah hal yang berdiri sendiri, melainkan hal yang berhubungan antara langkah yang satu dengan yang lain. Untuk menghindari timbulnya hambatan-hambatan dan kegagalan-kegagalan dalam pembinaan generasi muda, setiap langkah dalam pendekatan itu hendaklah dijalankan secara sebaik-baiknya dan seksama. Sebab setiap

langkah dalam pendekatan itu, saling mendukung dan saling berhubungan. Memang dalam tulisan ini tidak diberikan secara terperinci tentang setiap langkah dalam pendekatan itu, tetapi baru dalam garis-garis besarnya saja. Sedang dalam penerapannya setiap langkah masih perlu diuraikan dan disusun sedemikian rupa sehingga betul-betul mencapai maksudnya.

Untuk itu para Pembina Generasi Muda perlu mendapatkan latihan lebih dahulu, agar mereka memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan cara pendekatan ini. Garis-garis besar dari setiap langkah, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

### HUBUNGAN MASYARAKAT

Untuk kelancaran usaha pembinaan generasi muda, dibutuhkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat, baik dari perorangan maupun dari instansi-instansi. Jalannya usaha pembinaan generasi muda, bisa saja terhambat karena kurangnya perhatian dari masyarakat serta tidak adanya kerjasama. Para pembina pemuda harus memperhatikan benar-benar mengenai hal itu. Sebab adakalanya hal-hal seperti ini dapat menjadi kunci kegagalan dari usaha pembinaan generasi muda. Maka sejak semula dari usaha pembinaan generasi muda di suatu daerah, tindakan permulaan yang harus dijalankan adalah *hubungan masyarakat*.

Hubungan masyarakat adalah merupakan tehnik tersendiri yang harus dimiliki oleh para pembina generasi muda, sebab kegiatan ini harus dijalankan secara teratur, sistematis dan terencana.

Untuk setiap kali memulai usaha pembinaan generasi muda, perlu terlebih dahulu diadakan identifikasi dari instansi-instansi, tokoh-tokoh masyarakat maupun dari masyarakat sendiri dan jenis-jenis bantuan maupun dukungan yang diharapkan dari mereka, untuk menunjang pelaksanaan usaha pembinaan

generasi muda. Sebagai suatu contoh, untuk memulai usaha pembinaan generasi muda di suatu Daerah, katakanlah di suatu Daerah Kabupaten, maka bantuan-bantuan, dukungan dan kerjasama yang diperlukan dapat diidentifikasi misalnya dari Pemerintah Daerah, Instansi-instansi, tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat dan lain-lain, diperlukan bantuan berupa bahan-bahan, fasilitas-fasilitas, alat-alat, tenaga, maupun kerjasama.

Setelah diadakan identifikasi instansi-instansi, perorangan ataupun masyarakat dan bantuan-bantuan yang diharapkan dari mereka, maka perlu disusun dalam sebuah rencana tentang bantuan-bantuan dari instansi mana dan apa bantuan mereka dalam proses pembinaan generasi muda.

Sesudah hubungan masyarakat diadakan dan setelah jelasnya gambaran tentang bantuan dan dukungan dari mereka, maka usaha lebih lanjut adalah "penggugahan minat dan penyadaran pemuda akan kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalahnya" (usaha motivasi).

## USAHA PENGGUGAHAN MINAT DAN PENYADARAN KAUM MUDA AKAN KEBUTUHAN DAN MASALAH-MASALAHNYA

Pembinaan generasi muda haruslah dimulai dengan penggugahan minat dan penyadaran akan kebutuhan dan masalah-masalah agar kaum muda mau dan bersedia melaksanakan dan ikut berpartisipasi aktif dalam pembinaan generasi muda. Apabila minat dan kesadaran kaum muda tinggi, maka besar kemungkinan bahwa pembinaan generasi muda akan berhasil dengan baik. Sebab dasar pembinaan itu sudah kuat dan diletakkan di atas kesadaran dan pengertian kaum muda. Adapun tujuan untuk mengadakan penggugahan minat dan penyadaran akan kebutuhan dan masalah-masalahnya, ialah untuk membangkitkan minat, kesediaan dan tekad pada kaum



muda agar mulai aktif merencanakan dan melaksanakan usaha-usaha pembinaan generasi muda.

Untuk mencapai tujuan seperti tersebut di atas, diperlukan metode-metode yang benar-benar menarik yang dapat menyampaikan pesan-pesan dan yang sekaligus menghibur.

Usaha motivasi tersebut dapat dilaksanakan melalui media massa seperti koran dan majalah-majalah, radio, televisi maupun media lain seperti film. Bentuk lain untuk mengadakan motivasi ialah mengadakan pertunjukan dalam kelompok-kelompok kecil dengan metode-metode yang menarik, umpamanya dengan pertunjukan slide, film strip, pemutaran kaset, permainan simulasi, sosiodrama dll. Pelaksanaan penggugahan minat kaum muda melalui kelompok-kelompok kecil dapat lebih diefektifkan dengan diskusi kelompok, sehingga hasil dari pertemuan motivasi lebih mantap. Hasil motivasi pemuda lebih baik dan sukses apabila ada pertemuan bangkitnya minat secara massal atau bangkitnya semangat pemuda secara Nasional yang diterima oleh kaum muda melalui media-media massa seperti radio dan televisi dan kemudian dimantapkan dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Untuk melaksanakan pertemuan motivasi, perlu persiapan yang seksama agar programnya dapat berjalan dengan lancar. Maka perlu diperhatikan misalnya: undangan kepada para pemuda, pemberitahuan dan kerjasama dengan masyarakat setempat, adanya bantuan dan dukungan dari Pemerintah Daerah, persiapan tempat, acara dll.

Tema pokok dari pertemuan itu ialah yang menyangkut kebutuhan dan masalah-masalah kaum muda. Tema-tema dalam pertemuan motivasi hendaknya menarik dan betul-betul disesuaikan dengan minat kaum muda. Sudah barang tentu bahwa tema itu sesuai dengan program pembinaan generasi muda secara Nasional. Misalnya : kebutuhan akan ketrampilan, kebutuhan akan kesehatan dan kesegaran jasmani, kebutuhan akan rasa patriotisme dan lain-lain. Tema pokok motivasi itu hendaknya benar-benar dipahami oleh kaum muda dilihat dari segala segi kepentingan dan kemungkinan-kemungkinan pelaksanaannya oleh para pemuda. Program motivasi itu

haruslah menyangkut : (1) para pemuda harus merasakan kebutuhan mereka sebagai kaum muda yang sedang tumbuh dan berkembang; (2) para pemuda harus insaf pula akan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka sebagai tunas bangsa yang sedang berkembang; (3) sebagai penutup dari program motivasi perlu juga digambarkan hasil-hasil ideal apabila kebutuhan itu tercapai; gambaran ideal itu harus sekonkrit mungkin, agar pemuda dapat mengidentifikasikan diri dengan gambaran itu dan meyakinkannya sebagai cita-cita hidupnya.

Setelah ditimbulkan rasa kesadaran yang bersifat afektif, maka perlu juga diberikan dasar intelektual bersifat pengertian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menguraikan apa manfaat dan keuntungan dari menjalankan usaha-usaha pembinaan generasi muda dan juga garis-garis pelaksanaannya kemudian. Uraian itu harus disajikan sedemikian rupa sehingga bagi kaum muda juga nampak kemungkinan-kemungkinan kesulitan dan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. Tetapi digambarkan secara realistis dengan menanamkan rasa optimisme untuk mengatasinya. Keseluruhan harus merupakan suatu uraian yang selaras dengan kehidupan kaum muda.

Akhir dari pertemuan (usaha motivasi), perlu memberikan rangsangan kepada para pemuda untuk mengikuti sebuah kelompok pembinaan kaum muda yang akan merencanakan dan melaksanakan usaha pembinaan generasi muda di daerahnya, dengan memberikan semua informasi yang diperlukan untuk itu. Misalnya, tempat pendaftaran, tempat untuk berkonsultasi dan lain-lain.

Sesudah langkah ini selesai maka diteruskan dengan langkah berikut yakni "*identifikasi tentang situasi pemuda*", untuk mendapatkan gambaran nyata tentang keadaan pemuda di Daerah pembinaan itu, agar program pembinaan dapat disusun secara konkrit dan realistis.

## IDENTIFIKASI SITUASI PEMUDA

Untuk menyusun suatu rencana dan program pembinaan generasi muda yang baik dan realistis, diperlukan bahan-bahan berupa fakta-fakta dan informasi-informasi yang memberikan gambaran nyata tentang keadaan pemuda di Daerah pembinaan. Maka dari itu untuk mendapatkan gambaran tersebut, perlu diadakan identifikasi tentang situasi pemuda. Identifikasi ini dapat dilaksanakan dalam bentuk survey atau dengan *"penelitian sederhana"*. Jadi tidak dimaksudkan untuk mengadakan penelitian murni dan berbelit-belit. Dengan survey atau penelitian sederhana tentang situasi pemuda di daerah-daerah pembinaan dimaksudkan, suatu usaha untuk mendapatkan gambaran nyata tentang keadaan pemuda di daerah pembinaan dengan menggunakan tehnik-tehnik pengumpulan data. Tehnik-tehnik pengumpulan data itu disusun secara sederhana dan mudah dilaksanakan oleh para pembina pemuda atau petugas identifikasi yang tidak menuntut persyaratan tingkat pendidikan yang terlalu tinggi.

Ada bermacam-macam cara atau bentuk untuk mengadakan identifikasi keadaan pemuda. Salah satu cara yang diajukan dalam tulisan ini, oleh penulis disebut : *"SUATU BENTUK PENELITIAN YANG MENGIKUTSERTAKAN KAUM MUDA DALAM PENELITIAN"*.

Penelitian ini dalam pembinaan generasi muda dapat dirumuskan sebagai suatu bentuk penelitian sosial yang diselenggarakan dengan bantuan dari pada pemuda yang menjadi obyek penelitian itu, sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami keadaan mereka sendiri secara berlainan dan lebih baik dari sebelumnya.

Penelitian yang mengikut sertakan kaum muda, adalah sesuai dengan generasi muda yang dinamis pada waktu sekarang. Kehidupan sosial jaman dahulu yang mempunyai organisasi sebagai satuan yang meliputi beberapa jenis gaya hidup, sekarang terdesak oleh lingkungan baru dengan mana manusia



harus mengadakan hubungan dan sering banyak hal masih kurang dikenalnya dan dipahaminya. Sekarang ini permintaan dari generasi muda ialah supaya mereka mengadakan integrasi. Sebab di lain pihak kenyataan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi pemuda masih memperlihatkan kurang integrasi.

Mengadakan penelitian mengenai tuntutan-tuntutan baru belumlah cukup, bilamana tidak memandang latar belakang kebutuhan untuk mengadakan suatu kebijaksanaan yang baru. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan misalnya: tujuan penelitian yang terlalu umum dan kabur, sehingga seorang peneliti akan tampil ke depan dengan bermacam-macam bahan yang mungkin sangat menarik perhatian dari sudut sosiologis, tetapi kurang memberikan pengertian terhadap kebijaksanaan yang diperlukan. Jadi penelitian pertama-tama adalah bermaksud memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang diperlukan dalam penyusunan kebijaksanaan.

### **Meminta bantuan pada pemuda**

Berdasar atas pertimbangan tersebut di atas, maka dicari jalan yang dapat menjamin supaya ada saling pengertian di antara peneliti dan kebijaksanaan pengembangan generasi muda. Di samping mengadakan kontak yang lebih baik di antara para pemuda dengan orang-orang yang menjalankan kebijaksanaan pengembangan generasi muda, seperti pembina pemuda, pembimbing pemuda dll., diminta juga bantuan para pemuda untuk menjalankan penelitian itu.

Cara ini memberikan kesempatan untuk memenuhi pelbagai kebutuhan beriktu :

1. Orang yang menjalankan penelitian dapat lebih mendekati masalah-masalah yang dihadapi oleh para pemuda dewasa ini. Hal ini adalah penting, bukan saja untuk merumuskan masalah-masalah supaya lebih terang dalam hubungannya dengan situasi yang ada, tetapi pula untuk mencek, apakah masalah-masalah itu ada hubungan langsung dengan tujuan penelitian. Hal ini

## ANALISA

merupakan suatu cara untuk menghindarkan suatu pertentangan antara penelitian dengan harapan-harapan orang yang menjalankan kebijaksanaan pengembangan generasi muda.

2. Kebijaksanaan akan lebih mudah apabila para pemuda telah dipersiapkan untuk menerima inisiatif-inisiatif baru. Penerimaan baik itu hanya dapat diharapkan, bilamana para pemuda sudah menyadari dan memahami situasi yang ada.

3. Dengan demikian dapatlah diharapkan bahwa dengan menggugah para pemuda, akan menghasilkan sejumlah orang yang cakap dan bersedia untuk bekerjasama secara aktif dalam pelaksanaan suatu rencana.

### **Bermacam-macam cara untuk mengikut sertakan para pemuda**

Ada banyak kemungkinan dan cara-cara untuk mengikut sertakan kaum muda. Dalam hubungan ini dapat disebutkan interview-interview kelompok yang teratur yang diadakan oleh pembina pemuda dengan berbagai kelompok pemuda. Kaum muda yang diwakili dalam kelompok itu dilibatkan dalam penelitian dan bertindak sebagai sumber informasi. Para pemuda dapat juga diajar untuk mengumpulkan fakta-fakta, hal inipun adalah salah satu bentuk pengikutsertaan para pemuda dalam penelitian.

### **Suatu bentuk pengikutsertaan**

Bentuk penelitian ini hanya dipakai untuk cara mengikut sertakan sedemikian rupa, sehingga penelitian yang dijalankan itu betul-betul berhubungan dengan kebutuhan kaum muda dan masalah-masalahnya.

Dua aspek penelitian tersebut ialah aspek sosiopaedagogis dan aspek penelitian.

### 1. *Aspek sosio-paedagogis*

Dalam penelitian itu, terdapat kebutuhan untuk memperkenalkan masalah-masalah para pemuda sendiri dan dengan menjalankan penelitian ini mereka menyadari kebutuhan dan masalah-masalah mereka sendiri. Hal ini sangat berbeda dengan bentuk penelitian sosial lainnya, dimana tujuan dari penelitian ialah untuk mendapatkan fakta-fakta yang relevant saja.

### 2. *Aspek penelitian*

Di samping aspeknya yang sosio-paedagogis, masih ada satu aspek lain yakni aspek penelitiannya. Hal ini harus diajukan untuk menentukan syarat-syarat apa yang diharapkan dari penelitian. Penelitian itu bukan penelitian yang amat halus. Orang tidak dapat mengharapakan bahwa para peserta akan memakai segala metode yang berbelit-belit untuk mencapai pengetahuan dan pengertian. Pada umumnya orang sudah puas, bilamana tujuan sosio-paedagogis itu telah tercapai. Hal ini berarti bahwa juga tujuan dari penelitian dan hasil-hasil yang diharapkan, perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah dalam suatu hal tertentu dapat dipergunakan misalnya untuk penyusunan rencana kegiatan lebih lanjut.

Baik aspek sosio-paedagogis maupun aspek penelitian adalah penting. Kedua aspek itu menunjukkan syarat-syaratnya dalam rangka pengembangan generasi muda. Tujuan inti untuk mengadakan penelitian dengan mengikut sertakan kaum muda, ialah agar para pemuda menyadari situasi konkrit dan masalah-masalah yang dihadapinya. Maka alasan untuk mengadakan penelitian itu ialah seperti berikut :

1. Mereka ingin memberikan kepada pemuda suatu pengertian tentang situasi mereka sendiri, karena dikhawatirkan bahwa tanpa pengertian itu, rencana pengembangan tidak akan dapat dilaksanakan atau akan mempunyai efek yang berlainan dari yang dimaksudkan. Dengan kata lain agar mereka menerima inisiatif-inisiatif baru.



## ANALISA

2. Belum ada rencana-rencana, tetapi diharapkan agar supaya para pemuda akan mencapai suatu rencana kegiatan sebagai hasil dari penelitian itu.

3. Suatu alasan penting ialah untuk mengubah mentalita pemuda, tanpa langsung mengalami konsekwensi-konsekwensi berupa kebijaksanaan tertentu.

Selanjutnya perlu dipertimbangkan bahwa suatu penelitian yang berhasil baik, hampir selalu menunjukkan suatu kesediaan yang secara otomatis menjadi aktif, atau sekurang-kurangnya para pemuda menyadari masalah-masalahnya dan memiliki kesediaan untuk memperbaiki masalah tersebut dalam memenuhi kebutuhannya yang diperoleh dari menjalankan penelitian itu.

Suatu faedah lain dari penelitian itu adalah bahwa penelitian itu dapat disesuaikan lebih baik dengan kebijaksanaan pengembangan generasi muda. Di samping itu masih ada beberapa aspek yang menguntungkan yakni :

### **Kontak antar pemuda diperbaiki**

Penelitian itu mengumpulkan para pemuda dari berbagai-bagai kelompok yang dalam kehidupan biasa sedikit sekali bertemu. Mereka bertemu satu sama lain dan mendapat pengertian bahwa di antara mereka sebetulnya ada banyak masalah-masalah yang sama. Realitas kehidupan pemuda dalam suatu daerah tertentu sering ada perbedaan-perbedaan misalnya karena kedudukan sosial-ekonomi, keyakinan, perbedaan umur dll. Garis pemisah itu sering menyebabkan bahwa kontak diantara berbagai kelompok pemuda kurang. Kurangnya kontak itu menyebabkan adanya prasangka-prasangka dan salah faham. Penelitian ini memberikan suatu kesempatan baik untuk mengadakan kontak diantara kelompok-kelompok pemuda itu. Mereka menyadari persamaan-persamaan diantara mereka dan mereka saling menghargai.

## **Pengetahuan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemerintah.**

Suatu aspek penting lain adalah bahwa kaum muda mengerti bahwa pemerintah bukanlah tukang sulap, melainkan memberikan pembinaan agar kaum muda sendiri bersedia menjadi aktif dan bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Dengan demikian maka tuntutan-tuntutan yang berlebih-lebihan dapat dikembalikan kepada proporsi yang riil dan kaum muda tidak hanya melemparkan kritik-kritik terhadap Pemerintah, melainkan mereka akan mengerti apa yang harus dilakukan dengan bantuan dan pembinaan dari pemerintah.

Sebelum penyusunan rencana dan program pembinaan agar rencana dan program kegiatan yang dibuat betul-betul realistik dan di dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, maka keadaan atau gambaran situasi pemuda yang dihasilkan oleh identifikasi tentang situasi pemuda itu dipelajari dan dianalisa untuk menentukan sumber-sumber dan potensi-potensi yang diperlukan dalam pembinaan.

## **PENENTUAN SUMBER-SUMBER DAN POTENSI-POTENSI**

Setelah penelitian dan pengumpulan fakta-fakta diadakan, langkah lebih lanjut adalah penentuan sumber-sumber dan potensi-potensi serta kemungkinan-kemungkinan yang akan dipertimbangkan dalam penyusunan rencana pembinaan generasi muda. Penentuan itu dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

### **1. Tahap pendahuluan**

Dalam tahap pendahuluan dinyatakan pertanyaan sebagai berikut :

Apakah kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan baik atau tidak?

Apakah hal-hal yang akan dijalankan sebagai saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian sesuai dengan kebijaksanaan pembinaan generasi muda atau tidak? Pertanyaan semacam itu sesungguhnya belum merupakan penelitian dan penentuan kemungkinan, melainkan baru merupakan pertimbangan mengenai baik buruknya rencana kegiatan yang disarankan untuk dijalankan. Langkah ini disebut "diagnose" artinya mempelajari secara lebih mendalam fakta-fakta, informasi-informasi dan situasi pemuda di daerah pembinaan dalam hubungannya dengan penyusunan rencana dan program pembinaan. Dalam pertimbangan dan penelitian kemungkinan-kemungkinan itu pada umumnya ditentukan oleh ukuran baik atau buruk, untung atau rugi apabila kegiatan itu dilaksanakan atau dengan kata lain : Apakah kegiatan itu memperkuat atau memperlemah kerjasama pemuda? Apakah hal-hal yang kita lihat dari penelitian memberi kemungkinan masa depan yang lebih baik atau tidak? Apakah kegiatan itu menguntungkan atau merugikan? dan lain-lain. Maka untuk itu perlu ditentukan sumber-sumber dan kondisi-kondisi setempat. Para pembina pemuda hendaknya kreatif untuk menemukan sumber-sumber dan potensi-potensi yang ada di daerah itu, seperti misalnya; sumber bahan, uang, alat, tenaga dan lain-lain.

## 2. Tahap feasibility

Untuk penentuan atau penelitian kemungkinan pelaksanaan, yang pokok ialah menentukan semua unsur yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan (faktor penunjang dan faktor penghambat). Dalam fase ini perlu diperhatikan hal-hal berikut.

### *Penentuan sumber materiil*

Dalam hal ini dimaksudkan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk rencana kegiatan pembinaan generasi muda. Bahan-bahan itu bisa berupa alat-alat, fasilitas-fasilitas dan lain-lain.



*Penentuan investasi tenaga*

Penentuan ini tergantung dari minat dan kecakapan terutama dari kaum muda yang mau melaksanakan kegiatan pembinaan. Seringkali mereka yang berminat, tetapi tidak mempunyai kecakapan atau sebaliknya para pemuda yang terampil tetapi tidak berminat untuk ikut dalam pelaksanaan pembinaan generasi muda di daerahnya. Maka dari itu perlu dipelajari berapa diantara pemuda di daerah itu yang cakap dan berminat serta tersedia tidaknya waktu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pembinaan generasi muda.

*Perhitungan untung rugi untuk menjalankan suatu rencana kegiatan*

Perlu diperhitungkan bahwa rencana untuk melaksanakan kegiatan dalam pembinaan pemuda adalah "sarana" untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembinaan generasi muda seperti digariskan dalam GBHN. Jika dalam rencana kegiatan itu ternyata tidak mendukung ke arah terwujudnya cita-cita itu maka tidak ada gunanya melaksanakan rencana kegiatan itu.

*Penentuan kelangsungan rencana kegiatan pembinaan*

Dalam rencana kegiatan, perlu diperhitungkan rencana pembinaan jangka panjang dan rencana jangka pendek. Jadi kegiatan pembinaan tidak hanya merupakan kegiatan yang sesaat saja, melainkan harus berkesinambungan. Maka dari itu faktor-faktor yang berhubungan dengan swadaya, swakarya dan swasembada dalam pembinaan perlu diperhitungkan. Supaya kemudian harapan untuk berakarnya cita-cita pembinaan generasi muda di masyarakat tercapai.

*Hubungan vertikal*

Sudah jelas bahwa arah pembinaan generasi muda adalah seperti digariskan dalam GBHN. Jadi hubungan secara vertikal dari setiap pembinaan generasi muda yang diadakan harus sesuai dengan garis-garis pembinaan itu.

Setelah semua faktor-faktor dipelajari dan diperhitungkan yang dapat mendukung pelaksanaan pembinaan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskannya secara menyeluruh dan realistis dalam program pembinaan generasi muda.

### PENYUSUNAN PROGRAM

Setelah penelitian kemungkinan dan penentuan faktor-faktor serta jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, langkah lebih lanjut adalah penyusunan program. Dalam penentuan dan penelitian kemungkinan-kemungkinan telah diperoleh gambaran mengenai kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan kepemudaan di suatu daerah. Dan telah tersusun sejumlah daftar kegiatan yang akan dimasukkan dalam program pembinaan. Sudah barang tentu bahwa di samping kebaikan dan kemungkinan akan keberhasilan dari usaha pembinaan, juga telah diperkirakan mengenai kemungkinan-kemungkinan risiko atau kegagalannya. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program antara lain adalah seperti berikut :

#### 1. Penentuan tujuan

Dalam menjalankan kegiatan pembinaan generasi muda di suatu daerah, langkah pertama yang perlu diperhatikan ialah "penentuan tujuan". Tujuan yang akan dicapai haruslah dinyatakan secara jelas dan konkrit. Misalnya, salah satu usaha untuk menjaga kesehatan para pemuda ialah dengan berolahraga. Diberikannya ketrampilan kepada kaum muda, agar kaum muda dapat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan lain-lain.

#### 2. Penentuan target

Targeting tidak lain daripada objective dalam suatu ukuran yang tertentu, disesuaikan dengan kemungkinan pelaksanaan usaha tertentu. Penentuan target berarti penentuan batas konkrit hasil yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Jadi penentuan

target dimaksudkan menentukan batas sampai dimana usaha akan dijalankan dalam suatu periode tertentu dan sedapat mungkin dinyatakan dalam bentuk yang dapat diukur. Di sinilah hubungan antara perencanaan dan evaluasi, sebab evaluasi akan diadakan berdasar atas target-target yang telah ditentukan sebelumnya. Kalau target tidak dibuat dengan baik, maka evaluasi juga tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam pendekatan yang baik target yang jelas memudahkan pengukuran yang akan dimasukkan dalam program kegiatan.

### **3. Penentuan prioritas**

Untuk membuat suatu rencana yang baik, lebih dahulu ditentukan prioritas berdasar atas program pembinaan generasi muda. Prioritas yang didahulukan adalah usaha-usaha yang paling penting dalam pembinaan generasi muda artinya kegiatan yang diprioritaskan berdasar atas kebijaksanaan pembinaan generasi muda.

### **4. Penentuan strategi dan metode kerja**

Dalam penyusunan program kerja perlu dipikirkan metode dan strategi mana yang dipergunakan dalam melaksanakan program pembinaan. Dalam hal ini perlu dibedakan metode dan strategi secara Nasional dan metode pembinaan yang disesuaikan menurut keadaan daerah yang keduanya mempunyai tujuan yang sama yakni mewujudkan cita-cita pembinaan generasi muda seperti telah digariskan dalam GBHN. Maka dari itu para pembina pemuda hendaknya banyak belajar dan mengetahui metode dan strategi pembinaan dari bermacam-macam daerah untuk melihat dan membandingkan mana metode dan strategi yang berhasil dan mana yang kurang berhasil. Yang berhasil di suatu daerah dapat dicontoh untuk daerah lain, tetapi metode yang tidak berhasil di suatu daerah, jangan diulangi lagi di daerah lain dsb.



## 5. Penentuan logistik

Dari penentuan sumber-sumber dan potensi-potensi, telah dapat diketahui sejumlah bahan-bahan, fasilitas-fasilitas, alat-alat maupun uang yang akan dipergunakan dan yang mungkin didapat. Dalam program perlu diatur cara penggunaan dan pemanfaatannya. Bagaimana pemeliharaan dan kelanjutan dari bahan-bahan itu. Maka dalam penentuan logistik perlu diperhatikan. Sumber bantuan baik berupa uang maupun bahan-bahan dsb. serta sumber tenaga yang tersedia.

## 6. Alokasi keaktifan

Dengan alokasi keaktifan dimaksudkan, menentukan keaktifan mana yang akan dilaksanakan dan telah tersusun dalam program. Keaktifan harus disusun sedemikian rupa sehingga jelas kapan dan oleh siapa keaktifan itu dilaksanakan.

## 7. Alokasi tanggung jawab

Dalam alokasi tanggung jawab perlu diperhatikan, bahwa tanggung jawab diberikan kepada pemuda yang mempunyai loyalitas yang tinggi dalam usaha pembinaan generasi muda. Untuk membagi tugas dan tanggung jawab dalam usaha pembinaan generasi muda, semua peserta pembinaan generasi muda tidak mempunyai kedudukan yang sama. Tingkatan itu dibedakan seperti berikut :

(1) Tingkatan pemuda biasa, dimaksudkan para pemuda yang belum mengetahui mengenai tujuan pembinaan generasi muda. Mereka tertarik karena alasan subyektif atau oleh perintah pimpinan setempat. Mereka harus dijiwai dan dibimbing oleh para pembina dan oleh para pemuda yang mempunyai loyalitas dan kesadaran yang tinggi.

(2) Tingkatan pemuda peserta; adalah para pemuda yang ikut usaha pembinaan generasi muda dimana mereka telah mengerti dan memahami tujuan dari program pembinaan generasi muda. Mereka mempunyai keinsyafan mengenai jalannya

usaha pembinaan dan ikut berpartisipasi di dalamnya.

(3) Para pemuda aktif, dimaksudkan para pemuda yang bukan hanya peserta biasa, tetapi mereka bersedia untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka, dan bertanggung-jawab akan keberhasilan dari tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka.

(4) Pimpinan adalah orang yang membimbing dan mengarahkan serta bertanggung jawab pada usaha pembinaan generasi muda. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin ialah (a) supaya tugas yang diserahkan tidak bertentangan dengan garis kebijaksanaan pembinaan generasi muda; (b) penyerahan tugas dan tanggung jawab supaya dijalankan sesuai dengan kemampuan peserta; (c) mengadakan bimbingan dan pembinaan terhadap tugas-tugas yang diserahkan kepada para peserta; (d) mengkoordinir semua kegiatan dalam pelaksanaan pembinaan; dan (e) mempertanggung jawabkan pelaksanaan pembinaan.

## 8. Penentuan jadwal

Untuk menentukan jadwal dan alokasi waktu yang tepat sebaiknya pembina generasi muda memakai agenda yang memuat daftar keaktifan yang akan dijalankan dalam waktu tertentu. Agenda itu dibagi atas (1) agenda dalam periode keseluruhan pelaksanaan kegiatan, di mana dicatat semua yang perlu dilaksanakan; (2) agenda mingguan yang memuat keaktifan yang harus dijalankan dalam waktu selama satu minggu; (3) agenda harian dimana tercatat kegiatan tiap hari.

Susunan rencana dan program kegiatan pembinaan generasi muda merupakan garis penuntun atau merupakan sebuah pedoman untuk pelaksanaan pembinaan generasi muda.

### PELAKSANAAN

Untuk memulai pelaksanaan program pembinaan generasi muda secara teratur dan sistematis, dibutuhkan perhatian dan pemberian bimbingan oleh para pembina pemuda. Ada kalanya pada permulaan pelaksanaan kegiatan dengan penuh semangat. Dan ada kalanya pada permulaan kurang lancar, karena belum jelasnya tujuan pembinaan bagi para peserta. Lancar tidaknya pembinaan itu pada permulaan tergantung dari tinggi tidaknya motivasi bagi para pemuda untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan pembinaan generasi muda perlu diperhatikan pokok-pokok berikut :

#### **Melaksanakan kegiatan tepat seperti tercantum dalam rencana**

Dalam pelaksanaan usaha pembinaan generasi muda, perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan harus berlangsung sesuai dengan rencana. Seringkali terjadi bahwa rencana-rencana merupakan hal yang berdiri sendiri dan pada waktu pelaksanaan dimulai, rencana sudah dilupakan. Untuk mengatasi hal tersebut supaya pelaksanaan selalu disesuaikan dengan rencana. Dalam pembinaan generasi muda harus diciptakan suatu kebiasaan yang baru, yaitu disiplin kerja. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu diperhatikan hal-hal berikut :

##### *1. Perubahan harus dimulai perlahan-lahan*

Perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pembinaan generasi muda hendaknya perlahan-lahan supaya penerangan akan tujuan pembinaan betul-betul merupakan hal yang mendidik bagi kaum muda. Dan pada waktu memulai pelaksanaan, supaya dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang paling menarik bagi kaum muda. Hal-hal yang menarik itu sudah barang tentu tergantung dari keadaan setempat. Misalnya, kegiatan pemuda di daerah Pedesaan akan berbeda dengan kegiatan pemuda di daerah Perkotaan, biarpun mungkin hal itu tidak sama disemua daerah. Juga penting bagi para pembina, perubahan-perubahan



pada permulaan pelaksanaan selalu harus disesuaikan dengan situasi setempat. Apabila antusiasme pemuda di suatu daerah tinggi supaya pelayanan akan kebutuhan mereka juga disambut dengan baik.

## *2. Pasang surutnya dalam pelaksanaan*

Dalam pelaksanaan pembinaan pemuda kadang-kadang ditemui yang disebut up and down atau dengan kata lain naik-turunnya semangat pembinaan. Hal ini dapat dimengerti sebab pembinaan generasi muda adalah menyangkut masalah psikologis dan sosiologis. Untuk itu para pembina generasi muda hendaknya tetap memperhatikan situasi dalam pelaksanaan. Artinya, dimana ada gejala menurunnya semangat para peserta, pembina pemuda harus membangkitkan semangat itu kembali dengan jalan memberikan respon yang tepat pada masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang menyebabkan kemunduran semangat itu. Untuk masyarakat kita termasuk pemudanya, secara sosiologis dapat dilihat, keberhasilan suatu usaha tergantung dari banyaknya orang yang mengikuti usaha itu. Kalau usaha itu sedang maju, maka majulah semuanya. Akan tetapi kalau usaha itu sedang mundur, maka mundurlah semuanya. Sehingga kadang-kadang terlihat bahwa puncak sukses dari usaha pembinaan merupakan permulaan kegagalan. Karena itu dalam usaha pembinaan generasi muda, para pembina hendaknya mencari titik-titik pertahanan artinya membangun cara berfikir yang lebih rasionil bagi para peserta dan menanamkan sifat dan keuletan kepada para peserta. Dasar-dasar dan filsafat pembinaan yaitu GBHN dan Pancasila, harus benar-benar dihayati dan berakar dalam diri para peserta.

## *3. Dalam pelaksanaan pembinaan generasi muda terdapat faktor-faktor tak terduga*

Dalam pelaksanaan usaha pembinaan generasi muda kadang-kadang tampak kesulitan yang sebelumnya tidak diketahui. Artinya dalam identifikasi tentang situasi pemuda di suatu daerah, tidak diketemukan masalah-masalah itu yang menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan. Maka dari itu,

makin baiknya analisa situasi pemuda diadakan, akan memperkecil timbulnya faktor-faktor tak terduga tersebut. Apabila dalam pelaksanaan timbul faktor-faktor tidak terduga, para pembina harus memberikan pemecahan yang sebaik mungkin dengan tidak meninggalkan pola pokok pembinaan generasi muda.

#### *4. Dalam pelaksanaan perlu pembentukan kader*

Tim pembina generasi muda hendaknya memikirkan pembentukan kader untuk menjaga kelangsungan usaha pembinaan dan untuk meningkatkan keberhasilan dari usaha-usaha pembinaan generasi muda. Pembentukan kader itu bisa "*kader yang sudah bekerja*", artinya telah berkecimpung dalam pembinaan pemuda, kepada mereka diberikan inservice training. Juga pembentukan kader pembina yang baru.

#### *5. Dalam pelaksanaan perlu diperhatikan perluasan dan pemeliharaan*

Perluasan usaha pembinaan pemuda dapat berbentuk : (1) Perluasan dengan tambahan peserta artinya jumlah para peserta pemuda yang ikut berpartisipasi aktif dalam usaha pembinaan bertambah banyak; (2) Perluasan dengan bertambahnya keaktifan. Artinya kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha pembinaan diperbanyak sehingga kegiatan-kegiatan pembinaan sangat bervariasi; (3) Perluasan dengan penyerahan tanggung-jawab, artinya dengan makin meluasnya keaktifan juga makin banyaknya pendelegasian tanggung-jawab kepada para peserta pembinaan.

Dan yang paling pokok dalam pelaksanaan pembinaan generasi muda adalah "*pemeliharaan*". Dalam pemeliharaan perlu memperhatikan beberapa hal yakni : (1) pencegahan, dimaksudkan mencegah hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan usaha pembinaan; (2) apabila ada kesulitan-kesulitan dan kekurangan-kekurangan hendaknya diperbaiki sejak permulaan, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar kemudian.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, dalam pelaksanaan pembinaan generasi muda, suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah mengadakan "*evaluasi*" untuk melihat sejauh mana keberhasilan usaha pembinaan generasi muda, dan juga untuk melihat kesulitan-kesulitan apa yang timbul dalam pelaksanaan pembinaan.

## EVALUASI

Evaluasi untuk program pembinaan generasi muda dimaksudkan untuk mengadakan penilaian terhadap usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan pembinaan yang telah dijalankan, maupun pada kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan. Hal itu dimaksudkan untuk melihat sejauh manakah usaha itu telah mencapai sasaran dan target seperti telah disusun dalam program pembinaan. Dari hasil evaluasi akan menunjukkan sukses-sukses yang telah dicapai atau kekurangan-kekurangan yang dialami, yang perlu diperbaiki dalam pembinaan lebih lanjut. Hasil evaluasi akan merupakan umpan balik untuk melihat kepada tujuan yang telah dirumuskan lebih dahulu pada waktu perencanaan diadakan. Dalam mengadakan evaluasi perlu diperhatikan hal-hal berikut :

1. Dalam evaluasi perlu dinyatakan secara jelas ukuran-ukuran tentang sasaran-sasaran yang diharapkan akan dicapai oleh pelaksanaan pembinaan pemuda. Sasaran-sasaran itu sudah dinyatakan secara konkrit dan jelas dalam rencana kegiatan. Sedang evaluasi bertujuan untuk melihat sampai sejauh mana sasaran itu telah tercapai.
2. Evaluasi juga dapat melihat akibat-akibat yang timbul setelah sasaran-sasaran itu tercapai. Akibat-akibat itu bisa berbentuk positif, tetapi juga ada kemungkinan menimbulkan efek-efek negatif. Misalnya, setelah program pembinaan generasi muda dilaksanakan dan adanya pertemuan-pertemuan yang teratur, maka antar hubungan di antara pemuda menjadi baik, adanya saling pengertian antara satu sama lain, adanya kerja sama dan lain-lain.



## ANALISA

3. Dengan evaluasi kegiatan pembinaan pemuda dapat dilihat efisiensi kerja dalam hubungannya dengan penentuan waktu pelaksanaan. Misalnya: apakah dengan waktu yang telah ditargetkan dapat mencapai sasaran atau belum?

Dalam pelaksanaan evaluasi hendaknya ditetapkan dengan jelas indikator-indikator keberhasilan dari program pembinaan. Dan alat-alat pengumpulan data (alat pengukur) dibuat berdasar atas indikator-indikator itu. Sudah barang tentu setiap kali mengadakan evaluasi harus dibuat secara terencana sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk mengadakan evaluasi.

## PENUTUP

Hal-hal yang masuk dalam tulisan ini baru merupakan garis-garis besarnya saja, sebab tiap langkah seperti telah disebutkan dalam pendekatan itu, memerlukan pengetahuan dan ketrampilan tersendiri agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sukses. Maka kesimpulan sementara yang dapat ditarik oleh penulis dalam menjajagi "teknik-teknik pembinaan generasi muda" dalam rangka mengisi program pembinaan generasi muda adalah seperti berikut :

1. Dalam pembinaan generasi muda, seyogianya menerapkan pendekatan yang menyeluruh (komprehensif) dan terpadu. Sebab dalam pendekatan itu, menerapkan berbagai profesi yang saling menunjang (sosiologi, pendidikan, psikologi, penelitian dll.) dalam "Pembinaan Generasi Muda".
2. Dengan menerapkan suatu bentuk pendekatan, maka kita membangun suatu sistem pembinaan generasi muda yang lebih praktis dan terarah.
3. Para pembina generasi muda haruslah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan tentang berbagai bentuk pendekatan (teknik-teknik) pembinaan generasi muda, agar pembinaan generasi muda dapat berhasil dengan baik.

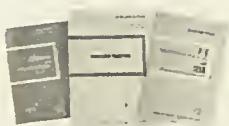


Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa majalah dan buku-buku yang membahas masalah-masalah sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, strategi, pemerintahan, ideologi dan hubungan internasional yang sangat luas.



#### ANALISA

*terbitan berkala, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Termasuk dalam seri ini adalah MONOGRAF yang membahas satu analisa tertentu. Harga per eks Rp. 700,— langganan setahun (12 nomor) Rp. 8.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 7.200,—*



#### RINGKASAN PERISTIWA

*majalah dwipekan, berisikan ringkasan peristiwa di dalam negeri (politik, ekonomi, sosial, budaya, pembangunan dan hankam) dan dunia internasional yang kompleks sifatnya, bersumberkan surat kabar, buletin serta majalah dalam dan luar negeri. Majalah ini merupakan salah satu sumber penulisan buku 'Indonesia dan Dunia Internasional' yang diterbitkan setiap tahun oleh CSIS. Harga per eks Rp. 350,—, langganan setahun (24 nomor) Rp. 10.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 9.000,—*



#### THE INDONESIAN QUARTERLY

*Majalah triwulan, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp. 800,—, langganan setahun (4 nomor) Rp. 3.200,—. Jilidan Vol. I, II, III, V a Rp. 4.000,—, Vol IV Rp. 3.000,—*



#### BUKU—BUKU

*hasil penulisan staf CSIS baik mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain*

CSIS juga menyediakan perpustakaan dan clippings yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada: Biro Publikasi — CSIS

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat      Telepon 349489

